

Buku Referensi : Learning By Doing Pembelajaran Kewirausahaan di Perguruan Tinggi

by Agus Eko S

Submission date: 14-Apr-2023 10:07AM (UTC+0700)

Submission ID: 2064061416

File name: 21_2022_Nop_BUKU_referensi.pdf (842.97K)

Word count: 17098

Character count: 114599

BUKU REFERENSI



LEARNING BY DOING

**Pembelajaran Kewirausahaan
di Perguruan Tinggi**



Prof. Dr. Agus Eko Sujianto, SE.,MM



**BUKU REFERENSI: LEARNING BY DOING,
PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN DI PERGURUAN TINGGI**

Penulis : Prof. Dr. Agus Eko Sujianto, SE.,MM

ISBN : 978-623-495-146-2

Copyright © November 2022
Ukuran: 15,5 cm X 23 cm; hlm.: xii + 100

Desainer sampul : Syafri Imanda
Penata isi : Syafri Imanda

Cetakan I: November 2022

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
CV. Literasi Nusantara Abadi
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: penerbitlitnus@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian atau keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, karya yang berjudul “Buku Referensi: *Learning By Doing*, Pembelajaran Kewirausahaan di Perguruan Tinggi” ini dapat penulis selesaikan sesuai dengan rencana. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, buku ini tidak saja diruntukkan bagi insan akademik atau civitas akademika (baik dosen maupun mahasiswa) di pendidikan tinggi, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas yaitu pemerhati kewirausahaan maupun pelaku usaha bahwa ilmu kewirausahaan itu dapat dipelajari dan tidak saja berangkat dari faktor keturunan maupun lingkungan.

Secara khusus, buku ini disusun dalam sepuluh pembahasan yaitu: Pendahuluan, Kesejahteraan Suatu Bangsa, Daya Saing Bangsa, Kewirausahaan Global, Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Tenaga Kerja UMKM, Ekspor Non Migas UMKM, Investasi UMKM, *Learning By Doing* Kewirausahaan dan Penutup yang dikemas sederhana berdasar penelitian mendalam penulis yang secara khusus mendalami bidang ilmu Pendidikan Ekonomi. Karya ini memfokuskan pada kesejahteraan dan pendidikan dalam bentuk pembelajaran sebagaimana amanat konstitusi dalam pembukaan UUD 1945, bahwa dibentuknya pemerintah Negara Indonesia dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan inilah yang dalam buku ini diperluas dalam bentuk pembelajaran kewirausahaan yang didasarkan pada *learning by doing*.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GRAFIK.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
BAB 2 KESEJAHTERAAN SUATU BANGSA.....	5
BAB 3 DAYA SAING BANGSA.....	17
BAB 4 KEWIRAUSAHAAN GLOBAL.....	27
BAB 5 JUMLAH UMKM.....	39
BAB 6 TENAGA KERJA UMKM.....	45
BAB 7 EKSPOR NON MIGAS UMKM.....	51
BAB 8 INVESTASI UMKM.....	57
BAB 9 LEARNING BY DOING KEWIRAUSAHAAN.....	63
BAB 10 PENUTUP.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	91



BAB 1

PENDAHULUAN

Persamaan ekonomi syariah dan ekonomi klasik-neoklasik antara lain jika ditinjau dari aspek tujuan, dimana kedua model ekonomi ini memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sedangkan terkait dengan metode untuk mencapai kesejahteraan menjadi persoalan lain, dimana pada masing-masing sistem ekonomi ini memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal cara mewujudkannya dan cara untuk mengukurnya.

Cara mewujudkan kesejahteraan pada ekonomi syariah yaitu melarang unsur gharar, riba dan maysir dalam kegiatan *al-Mu'amalah al-Maddiyah* (Khobir, 2009). Sedangkan ekonomi klasik tidak mengenal ketiga aspek tersebut. Cara mengukur kesejahteraan menurut ekonomi syariah tidak saja pada aspek kuantitatif tetapi juga memperhatikan aspek kualitatif atau kuantitatif yaitu terpenuhinya enam kebutuhan pokok: sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Parameter tersebut berbeda dengan ukuran kesejahteraan menurut ekonomi klasik-neoklasik yang bersifat kuantitatif yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang sekarang mengalami transformasi yaitu diukur oleh aspek angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah serta pengeluaran per kapita.

Meskipun demikian diperlukan akselerasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang pada studi ini memilih kewirausahaan dengan parameter yaitu: Daya Saing Bangsa (*Global Competitiveness*

Index), Kewirausahaan Global (*Global Entrepreneurship Index*), jumlah UMKM, Tenaga Kerja UMKM, Ekspor Non Migas UMKM dan Investasi UMKM.

Peneliti memilih kewirausahaan sebagai faktor yang mendorong kesejahteraan mengingat seorang wirausahawan (*Entrepreneur*) pada negara-negara maju mendapat posisi terhormat karena kreativitas dan inovasinya yang mampu menggerakkan perekonomian. Demikian menurut Sanyang & Huang (2010); *United Nations Conference on Trade and Development* (2005) yang menemukan bahwa kewirausahaan adalah sumber inovasi dan perubahan, dan dengan demikian memacu peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi. Huang & Chen (2021) menjelaskan bahwa di Cina kewirausahaan biasanya terjadi dalam sistem yang inovatif dan kebanyakan berada di kota-kota. Bahkan di kota Zhaoqing, Shantou dan Meizhou pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kewirausahaan.

Sedangkan di Jerman kewirausahaan melahirkan pengusaha dan pencipta perusahaan baru, menguntungkan ekonomi dalam beberapa cara melalui kegiatan inovatif, penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan produktivitas dan persaingan. Tanpa wirausahawan baru dan bisnis yang mereka ciptakan, ekonomi mungkin terhenti. Oleh karena itu, pembentukan usaha baru oleh pengusaha dianggap sebagai salah satu sumber inovasi dan pertumbuhan ekonomi (Kritikos, 2015). Demikian juga menurut Stam & Stel (2009) pada negara-negara berpenghasilan tinggi jumlah kewirausahaan mengalami pertumbuhan dan berkontribusi kuat terhadap pertumbuhan ekonomi 36 negara yang berpartisipasi dalam *Global Entrepreneurship Monitor* (GEM) pada tahun 2002.

Studi di luar negeri terkait kontribusi kewirausahaan terhadap kinerja ekonomi di atas juga relevan dengan studi di dalam negeri (Indonesia) bahwa pemerintah Indonesia telah menggalakan jiwa dan semangat *entrepreneur* khususnya menjadi *digitalpreneur* untuk mendorong perekonomian nasional (Marlinah, 2019).

Disamping kreatifitas yang menjadi kekuatan wirausahawan dalam meningkatkan perekonomian suatu negara (Mutiarasari, 2018), menurut Darajah et al., (2018) untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses hendaknya seseorang memiliki sifat proaktif, produktif, pemberdaya, tangan di atas (suka memberi), rendah hati, kreatif, dan inovatif. Keberadaan wirausahawan ini penting bagi pemerintah dalam mengurangi jumlah

pengangguran dan kemiskinan serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia.

Lebih jauh Fajri (2021) mengemukakan bahwa kewirausahaan merupakan jantung pembangunan ekonomi, kewirausahaan merupakan inovator pencipta lapangan kerja dan pada akhirnya pendapatan masyarakat meningkat yang dapat mempengaruhi produk domestik bruto (PDB). Namun demikian hanya kewirausahaan yang produktif dan didukung ekosistem yang baik yang pastinya dapat menunjang pertumbuhan ekonomi.

Pemikiran singkat di atas merupakan potret sederhana bahwa kewirausahaan merupakan bagian dari suatu entitas bisnis yang perlu dikembangkan, mengingat kontribusinya dalam meningkatkan kinerja perekonomian suatu negara. Oleh karenanya diperlukan sinergitas semua pihak termasuk perguruan tinggi sebagai garda terdepan dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, yang kompeten dan mempunyai kemampuan adaptif pada situasi apapun juga termasuk situasi pada masa pandemi Covid-19.

Upaya strategis yang relevan dan menjadi ranah perguruan tinggi yaitu dengan melembagakan kewirausahaan dalam kurikulum pendidikannya. Menurut Schramm (2019) pendidikan tinggi menjadi dasar untuk masa depan kehidupan di Amerika. Bahkan kemakmuran ekonomi masyarakat bergantung pada warga masyarakat yang terdidik. Amerika menghargai penguasaan pengetahuan dan intelektual yang luas, kesiapan untuk bekerja dan menghormati keragaman. Sedangkan Fleming (1999); Hina & Khaliq (2020) menjelaskan bahwa saat ini kurikulum kewirausahaan di tingkat universitas menggunakan kurikulum berbasis kompetensi khususnya untuk lulusan bisnis. Kurikulum kewirausahaan yang dimaksud yaitu tidak sekedar menguasai aspek pengetahuan tetapi juga keterampilan dalam memecahkan tantangan-tantangan bisnis.

Setelah kewirausahaan melembaga pada struktur matakuliah, langkah berikutnya yaitu menentukan model pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai secara efektif dan efisien. Namun demikian sebelum memutuskan model pembelajaran yang digunakan ada baiknya memperhatikan penjelasan Rusman (2012), bahwa ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan model pembelajaran yaitu: (1) pertimbangan terhadap tujuan yang hendak dicapai; (2) pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau

materi pembelajaran; (3) pertimbangan dari sudut peserta didik dan (4) pertimbangan lainnya yang bersifat nonteknis.

Banyak penelitian yang mengkaji efektivitas pembelajaran kewirausahaan menggunakan model *learning by doing*, antara lain Colombelli et al., (2022), bahwa niat berwirausaha dan persepsi tentang karakteristik dan keterampilan kewirausahaan siswa meningkat setelah mengikuti *learning by doing*. Demikian juga dengan studi Fayolle (2013); Hidayat et al., (2018) bahwa dengan konsep *learning by doing* pembelajaran kewirausahaan di perguruan tinggi menjadi bermakna sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Secara khusus buku ini memberi solusi tentang permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan tinggi dalam berkontribusi untuk membangun negeri yaitu:

1. Bagaimana pengaruh daya saing terhadap kesejahteraan suatu bangsa?
2. Bagaimana pengaruh kewirausahaan terhadap kesejahteraan suatu bangsa?
3. Bagaimana pengaruh jumlah UMKM terhadap kesejahteraan suatu bangsa?
4. Bagaimana pengaruh tenaga kerja UMKM terhadap kesejahteraan suatu bangsa?
5. Bagaimana pengaruh ekspor non migas UMKM terhadap kesejahteraan suatu bangsa?
6. Bagaimana pengaruh investasi UMKM terhadap kesejahteraan suatu bangsa?



BAB 2

KESEJAHTERAAN SUATU BANGSA

Kesejahteraan masyarakat merupakan cita-cita luhur pemerintah Republik Indonesia yang termaktub dalam konstitusi negara yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang secara eksplisit disebutkan dalam alenia ke-empat yaitu:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan **kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa**, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (DPR-RI, 2016).

Berdasar pembukaan tersebut dapat dijelaskan mengenai posisi kesejahteraan yang diikuti oleh kecerdasan kehidupan bangsa yang secara eksplisit pemerintah Indonesia tidak saja memfasilitasi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sebagaimana dalam pembukaan undang-undang dasar, tetapi

juga mempunyai komitmen untuk merealisasikan masyarakat Indonesia yang cerdas dan hal ini dapat terwujud jika didukung oleh sistem penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.

Kesejahteraan dan kualitas pendidikan mendapat porsi signifikan dalam Pembukaan dan Undang-undang Dasar 1945, sebagaimana penjelasan berikut ini.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat 1: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (DPR-RI, 2016);

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 5: Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (DPR-RI, 2016).

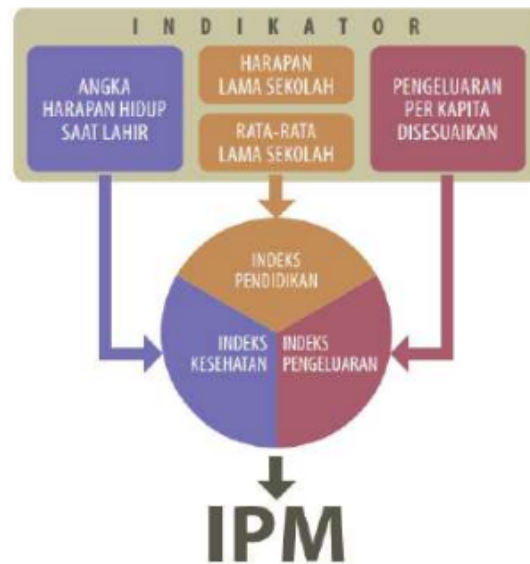
Mengenai kualitas pendidikan khususnya di perguruan tinggi menurut Singgih & Rahmayanti (2008) ditentukan oleh proses pembelajaran yang digunakan, kurikulum program studinya, sumber daya manusianya yaitu civitas akademika meliputi dosen dan mahasiswa, fasilitas prasarana dan sarana, atmosfir akademik, dukungan dana atau keuangan, penelitian dan publikasi ilmiah insan akademiknya, pengabdian kepada masyarakat dan tata kelola kelembagaannya.

Jušćáková (2012) dalam studinya juga menjelaskan bahwa kualitas pendidikan tidak cukup hanya diukur oleh pengujian kognitif tetapi memerlukan indikator tambahan lainnya yaitu: motivasi belajar siswa, etos belajar dan lingkungan sekolah khususnya di Slovakia. Sedangkan Lacruz et al. (2019) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa kualitas pendidikan khususnya di Brasil dipengaruhi oleh kemampuan manajerial guru dan kurikulum yang digunakan. Lebih luas Menon & Rama (2006) menjabarkan bahwa kualitas pendidikan sangat bergantung pada: (1) desain dan perencanaan kurikulum; (2) transaksi dan evaluasi kurikulum; (3) penelitian, pengembangan dan penyuluhan; (4) infrastruktur dan sumber daya pembelajaran; (5) dukungan dan kemajuan mahasiswa serta (6) organisasi dan manajemen.

Sedangkan kesejahteraan suatu bangsa dalam studi ini diproxy oleh *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia. BPS (2018) menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia bermanfaat untuk mengukur nilai capaian pembangunan manusia berdasar komponen dasar kualitas hidup. Komponen dasar yang dimaksud yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Selanjutnya untuk mengukur aspek kesehatan dapat menggunakan angka harapan hidup waktu lahir, aspek pengetahuan dapat dipotret berdasar angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun aspek hidup layak didasarkan pada kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok yang secara teknis dapat terlihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita.

Indeks Pembangunan Manusia ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara yang didasarkan pada pendapat Bado et al. (2018); Fleurbaey (2019); Picatoste et al. (2020) income per capita, infrastructure, education, institutions and population against inequality between regions and welfare in Indonesia. The study uses panel data regression analysis analyzing secondary data consisting of 33 provincial cross section data and 10 years time series data (2008-2017) bahwa Indeks Pembangunan Manusia dapat ditafsirkan indikator nasional untuk mengukur kesejahteraan. Demikian halnya dengan penjelasan Suradi (2007) bahwa pembangunan manusia dapat digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan sosial. Studi pada Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa tingkat Indeks Pembangunan Manusia termasuk dalam kategori rendah sehingga tingkat kemiskinannya tinggi. Dan sebaliknya jika Indeks Pembangunan Manusia tinggi maka tingkat kemiskinan rendah yang berarti masyarakat semakin sejahtera.

Gambar di bawah ini menunjukkan model beberapa indikator yang digunakan untuk menurunkan nilai Indeks Pembangunan Manusia menurut BPS (2018).



Gambar 1. Model Indikator IPM

Berdasar gambar di atas dapat dijelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia diturunkan dari tiga aspek indeks yaitu: indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran. Masing-masing dari ketiga indeks inipun diturunkan menjadi beberapa indikator, dimana indeks kesehatan diturunkan dari angka harapan hidup saat lahir. Indeks pendidikan diturunkan dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Kemudian indeks pengeluaran diturunkan dari pengeluaran per kapita disesuaikan. Dengan demikian maka aspek yaitu: angka harapan hidup saat lahir (*Life expectancy at birth*), harapan lama sekolah (*Expected years of schooling*), rata-rata lama sekolah (*Mean years of schooling*) serta pengeluaran per kapita (*Gross national income (GNI) per capita*) disesuaikan disebut indikator dari Indeks Pembangunan Manusia.

Menurut BPS (2020b), angka harapan hidup saat lahir (*Life expectancy at birth*) termasuk dalam dimensi kesehatan merupakan aspek yang menunjukkan tentang umur panjang dan hidup sehat penduduk dari periode ke periode biasanya satu tahun. Jadi angka harapan hidup saat lahir merupakan usia rata-rata harapan seorang bayi yang baru lahir untuk hidup dan mencapai usia tertentu hingga meninggal dunia.

Selanjutnya BPS (2020b) menjelaskan bahwa harapan lama sekolah (*Expected years of schooling*) termasuk dalam dimensi pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan, yaitu lamanya mengikuti kegiatan pendidikan di sekolah dalam satuan tahun yang diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh anak pada umur tertentu di masa yang akan datang.

Angka harapan lama sekolah digunakan untuk menunjukkan peluang peserta didik pada usia lebih dari 7 tahun yang mengenyam pendidikan khususnya di pendidikan formal pada waktu tertentu. Kemudian rata-rata lama sekolah (*Mean years of schooling*) merupakan jumlah tahun yang diperlukan oleh penduduk dalam mengikuti pendidikan formal. Angka ini lazim digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat pada suatu wilayah tertentu. Ketentuan yang digunakan yaitu, penduduk yang tamat sekolah dasar dapat diperhitungkan bahwa lama sekolah selama 6 tahun, kemudian tamat sekolah menengah pertama dapat diperhitungkan jumlah lama sekolah selama 9 tahun. Sedangkan lulus sekolah menengah atas dapat diperhitungkan bahwa lama sekolah selama 12 tahun dengan asumsi mengabaikan pernah tinggal kelas atau tidak.

Sedangkan pengeluaran per kapita (*Gross national income (GNI) per capita*) merupakan sejumlah pengeluaran atau biaya untuk kegiatan konsumsi semua anggota keluarga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota keluarga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Data pengeluaran ini dapat mengungkapkan pola konsumsi suatu rumah tangga secara umum dengan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan parameter untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin membaik tingkat kesejahtraannya (BPS, 2020b).

Perhitungan angka indeks pembangunan manusia yang didasarkan pada empat indikator di atas kemudian dikelompokkan menjadi 4 bagian yaitu: capaian pembangunan sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah. UNDP (2018) membuat klasifikasi terhadap nilai indek pembangunan manusia menjadi 4 klasifikasi berikut ini:

7. Indeks Pembangunan Manusia sangat tinggi jika nilainya 0,800 atau lebih;
8. Indeks Pembangunan Manusia tinggi jika nilainya 0,700-0,799;
9. Indeks Pembangunan Manusia sedang jika nilainya 0,550-0,699;
10. Indeks Pembangunan Manusia rendah jika nilainya kurang dari 0,550.

Sedangkan dalam konteks internasional, studi pada 5 negara utama yang tergabung di *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* yaitu: Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand dapat dijelaskan

bahwa indeks pembangunan manusia tertinggi yaitu Singapura dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2019 sebagaimana dalam tabel 1. Peringkat kedua yaitu Malaysia, dan Thailand menduduki peringkat ketiga. Sedangkan Indonesia dan Philipina bersaing pada peringkat keempat dan kelima.

Tabel 1. Angka Indeks Pembangunan Manusia 5 Negara ASEAN



Capaian terhadap tingkat pembangunan manusia yang diukur oleh indeks pembangunan di atas tidak bisa dilepaskan dengan pertumbuhan ekonomi. Menurut Arisman (2018), bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi menjadi variabel eksogen dalam kaitannya dengan variabel endogen yaitu indeks pembangunan manusia pada sepuluh negara anggota ASEAN yaitu: Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, Indonesia, Myanmar, Filipina, Kamboja, Vietnam dan Laos dalam periode waktu tahun 2008 sampai dengan 2015.

Hasil yang berbeda sebagaimana penelitian Appiah et al., (2019) bahwa dalam rentang waktu tahun 1990 sampai dengan 2015 terdapat dampak yang positif dan signifikan variabel pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara Afrika. Sehingga direkomendasikan kepada pemerintah untuk berorientasi pada pengembangan kualitas sumber daya manusia. Terlepas dari temuan Appiah et al., (2019); Arisman (2018), bahwa keduanya memberikan wacana ekonomi bahwa sumber daya manusia menjadi kunci dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa dan negara. Sumber daya manusia

menjadi operator-operator penting untuk membuat suatu negara dapat bersaing dengan negara lainnya di dunia, demikian juga dengan di perusahaan.

Sumber daya manusia merupakan aset perusahaan dan aset negara sebagaimana dikemukakan oleh Kulla et al., (2018) yang menjelaskan bahwa sumber daya manusia merupakan aset bangsa dan setara dengan sumber daya alam sekalipun. Sumber daya alam yang melimpah jika tidak dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas maka hanya dinikmati oleh bangsa dan negara lain. Dengan demikian proses rekrutmen dan penempatan sumber daya manusia ini sangat menentukan organisasi menuju terwujudnya visi dan misi yang telah dirumuskan.

Kemudian Mohammed et al., (2013) mengemukakan bahwa dalam sebuah organisasi, sumber daya manusia menjadi aset penting bahkan kinerja organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Oleh karenanya, keberadaan sumber daya manusia ini harus dikelola secara maksimal melalui pendidikan dan pelatihan serta memotivasi untuk terus berkembang. Sumber daya manusia yang berkembang dan tidak statis ini akan membawa organisasi dalam meningkatkan produktivitasnya. Dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia ini pada titik tertentu dapat meningkatkan efisiensi sehingga organisasi dapat bertahan dan berkembang selama-lamanya. Dengan demikian pengembangan kualitas sumber daya manusia ini tidak sekedar dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, tetapi juga pengembangan dan perencanaan karir yang jelas serta perbaikan dan pertumbuhan kualitas hidupnya dalam bentuk pemenuhan kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan.

Pentingnya sumber daya manusia sebagai aset bangsa juga dikemukakan oleh Sa'adah (2015) bahwa untuk membangun negara Indonesia yang kompetitif paling tidak di kawasan ASEAN diperlukan sumber daya manusia yang kreatif yang tidak saja unggul dalam hal penguasaan pengetahuan, teknologi dan keterampilan, tetapi juga menjadi sumber daya manusia yang mengerti jati dirinya sebagai bagian dari suatu bangsa. Jati diri ini dapat diwujudkan dalam bentuk sumber daya manusia yang berideologi kuat dan mampu dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam hidup dan kehidupannya.

Bahkan di Seychelles, sumber daya manusia ditempatkan sebagai sumber daya strategis dan menjadi pusat pembangunan dalam berbangsa

dan bernegara di negara itu. Masyarakat Seychelles merupakan aset utama dalam membangun peradaban sosial dan ekonomi negara sehingga dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan suatu negara. Kuantitas sumber daya manusia jika didukung oleh meningkatnya kualitas sumber daya manusia akan dapat mendorong terwujudnya negara yang kuat ditinjau dari aspek ekonomi (Adams et al., 2002).

Dalam konteks ke-Indonesia-an, sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mendukung terwujudnya program pemerintah pada sektor kependudukan dan ekonomi yaitu bonus demografi. Menurut Ross (2004) bonus demografi (*demographic bonus* atau *demographic dividend*) merupakan suatu situasi dan kondisi dimana masyarakat sebagai populasi suatu negara didominasi oleh masyarakat individual yang termasuk dalam kelompok usia produktif. Sedangkan yang dimaksud dengan usia produktif yaitu masyarakat dalam rentang usia 15 sampai dengan 64 tahun.

Menurut Sutikno (2020), jumlah penduduk pada kategori usia produktif mencapai puncaknya pada tahun 2020 sampai dengan 2035. Sedangkan (Falikhah, 2017) menjelaskan bahwa bonus demografi melahirkan dua kondisi yaitu potensi dan ancaman. Pada aspek ancaman terjadi ketika suatu negara tidak bisa memanfaatkan bonus demografi yang pada titik tertentu akan menjadi beban bagi negara karena berpotensi menimbulkan masalah sosial kemasyarakatan. Dengan demikian diperlukan langkah-langkah strategis untuk merubah ancaman menjadi bonus demografi baik pada sektor ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Studi Maryati et al., (2021) menunjukkan bahwa kemandirian sumber daya manusia merupakan kunci sukses untuk meraih bonus demografi, dan jika rasio ketergantungan sumber daya manusia ini masih tinggi maka bonus demografi sulit dapat terwujud. Kemandirian dapat diimplemmentasikan dalam bentuk kemampuan dalam menciptakan kesempatan kerja baru misalnya melalui kewirausahaan. Kemandirian ini dapat terwujud ketika sumber daya manusia memiliki kecakapan dan berkompeten di bidangnya sebagaimana penjelasan Nurrohmah et al., (2021)

Dalam konteks yang lebih luas, Jati (2015) mengemukakan bahwa peningkatan penawaran terhadap tenaga kerja produktif dapat berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Bonus demografi ini juga dapat meningkatkan konsumsi nasional dan investasi sumber daya manusia dalam bentuk penyediaan infrastruktur pendidikan baik

dalam bentuk fisik misalnya gedung dan peralatan lainnya maupun non fisik misalnya kurikulum pendidikan. Kedua aspek ini yaitu konsumsi dan investasi diyakini secara makroekonomi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

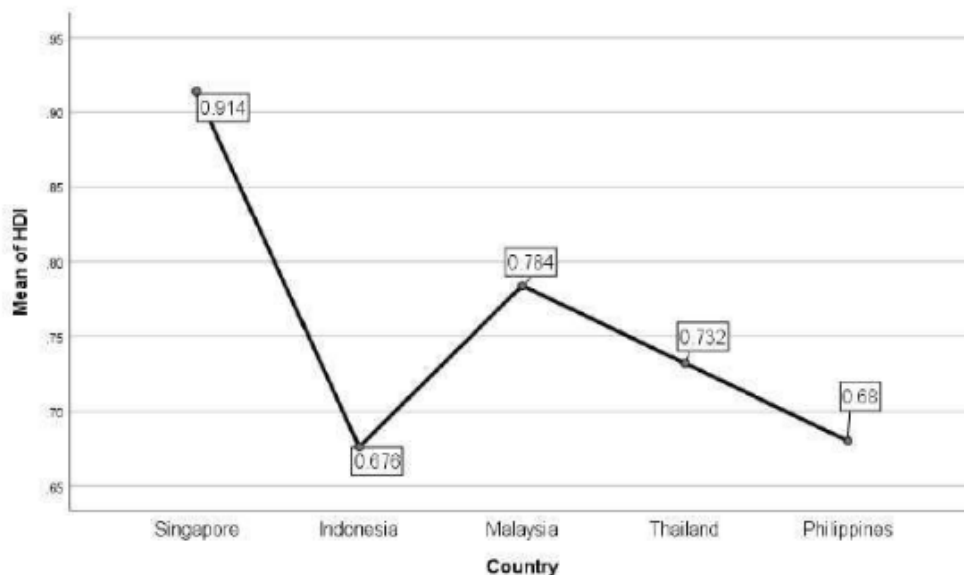
Lantas, bagaimana jika dibandingkan dengan negara tetangga di lingkup ASEAN yaitu Singapura, Malaysia, Thailand dan Philipina yang tidak berkesempatan memperoleh bonus demografi sebesar Indonesia?. Pengujian statistika terkait kesejahteraan masyarakat yang diukur oleh indeks pembangunan manusia menggunakan data historis mulai tahun 2010-2019 menunjukkan terdapat perbedaan signifikan tingkat kesejahteraan Singapura-Indonesia, Singapura-Malaysia, Singapura-Thailand, Singapura-Philipina, Indonesia-Malaysia, Indonesia-Thailand, Malaysia-Thailand, Malaysia-Philipina dan Thailand-Philipina. Sedangkan pengujian terhadap Indonesia-Philipina menunjukkan hasil yang tidak signifikan atau dengan kata lain bahwa terdapat persamaan indeks pembangunan manusia Indonesia-Philipina sebagaimana dalam tabel 2.

Tabel 2. Uji One Way ANOVA Pendekatan Tukey HSD

(I) Country	(J) Country	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
Singapore	Indonesia	.23800 [*]	.01361	.000	.1993	.2767
	Malaysia	.13000 [*]	.01361	.000	.0913	.1687
	Thailand	.18200 [*]	.01361	.000	.1433	.2207
	Philippines	.23400 [*]	.01361	.000	.1953	.2727
Indonesia	Malaysia	-.10800 [*]	.01361	.000	-.1467	-.0693
	Thailand	-.05600 [*]	.01361	.001	-.0947	-.0173
	Philippines	-.00400	.01361	.998	-.0427	.0347
Malaysia	Thailand	.05200 [*]	.01361	.004	.0133	.0907
	Philippines	.10400 [*]	.01361	.000	.0653	.1427
Thailand	Philippines	.05200 [*]	.01361	.004	.0133	.0907

Hasil yang sama juga dapat dilihat pada grafik 1 tentang rata-rata Indeks Pembangunan Indonesia 2010-2019 dimana peringkat pertama

diduduki oleh Singapura, disusul oleh Malaysia dan Thailand pada peringkat kedua dan ketiga. Sedangkan Indonesia dan Philipina berada pada peringkat yang relatif sama yaitu peringkat empat. Singapura sebagai negara maju baik di tingkat dunia maupun di ASEAN selalu mendominasi kinerja ekonominya meskipun tidak memiliki kekuatan dalam hal sumber daya alam dan tambang serta jumlah penduduk yang terbatas. Namun karena mereka kuat pada sektor industri dan jasa sehingga Singapura mendapat sebutan “Macan Asia”. Bahkan anggaran militer sangat besar sehingga pertahanan negara ini menjadi lebih kuat dibanding negara-negara lainnya di ASEAN termasuk Indonesia.



Grafik 1. Rata-rata Indeks Pembangunan Indonesia 2010-2019

Pemetaan Indeks Pembangunan Manusia berdasar provinsi di Indonesia masih belum merata karena provinsi yang berada pada posisi indeks yang tinggi masih didominasi oleh provinsi di pulau Jawa, Bali, Sumatera (tidak termasuk Lampung), Kalimantan (tidak termasuk Kalimantan Barat), Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Sedangkan Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Ambon, Maluku dan Papua masih dalam kategori sedang angka Indeks Pembangunan Manusia.

Semakin tinggi nilai Indeks Pembangunan Manusia pada masing-masing provinsi di Indonesia ini mencerminkan bahwa angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah serta pengeluaran per kapita disesuaikan juga tinggi, begitu juga sebaliknya.



Gambar 2. Peta Indeks Pembangunan Manusia Berdasar Provinsi



BAB 3

DAYA SAING BANGSA

Menurut Durand & Giorno (1987), daya saing seringkali digunakan untuk mengkaji persoalan-persoalan makroekonomi suatu negara pada tahun tertentu, dengan cara membandingkannya dengan negara lain di dunia. Sedangkan menurut Deniz et al. (2013), daya saing bersifat umum tidak saja membicarakan tentang aspek nasional atau bangsa atau negara, tetapi juga mengkaji pada aspek-aspek mikro yaitu perusahaan dan industri. Dengan demikian daya saing adalah konsep yang beragam dan membahas tentang konsep multidimensi yaitu perusahaan maupun negara sekalipun yang bersaing untuk mencapai kemenangan (Čibinskienė, 2010).

Daya saing tidak saja terkait dengan perusahaan dan negara, tetapi juga mengkaji pada aspek daerah, yaitu bagian dari suatu negara. BPS (2020) mendefinisikan bahwa indeks daya saing daerah adalah refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Indeks ini sekaligus digunakan untuk memberikan penilaian terhadap keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya.

Daya saing dalam studi ini diproyeksi oleh *Global Competitiveness Index* atau indeks daya saing global Indonesia dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2021 atau selama 12 tahun. Menurut Nadya et al. (2020), indeks daya saing global atau disebut juga dengan *Global Competitiveness Index* adalah angka indeks yang memberikan ukuran tentang perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitasnya pada tahun tertentu. Faktor-faktor produksi menjadi sumber ekonomi yang

sangat penting bagi suatu negara, dan harus dimanfaatkan dan dikelola secara efisien dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi tidak saja dalam jangka pendek tetapi juga untuk kepentingan pertumbuhan dalam jangka panjang yang bisa dinikmati oleh anak cucu secara berkelanjutan.

Indeks daya saing global tidak terlepas dari 12 faktor penting atau yang biasa disebut dengan 12 pilar sebagaimana teori Schwab (2019) yaitu: institusi, infrastruktur, kesehatan, keterampilan, pasar barang dan jasa, sistem keuangan, pasar tenaga kerja, ukuran ekonomi, dinamika bisnis serta kemampuan inovasi. Ke-12 pilar ini kemudian di sederhanakan lagi menjadi 3 pilar, yang menurut Nadya et al. (2020b) terdiri dari: lingkungan yang mendukung, modal manusia dan pasar. Aspek lingkungan yang mendukung meliputi pilar institusi, pilar infrastruktur, pilar adopsi TIK dan pilar makroekonomi. Kemudian aspek modal manusia terdiri dari pilar kesehatan dan keterampilan. Sedangkan aspek pasar mengkaji tentang pilar pasar barang dan jasa serta system keuangan.

Pilar pertama yaitu institusi yang mengkaji tentang keamanan, modal sosial, checks and balances, kinerja sektor publik, transparansi, hak milik, tata kelola perusahaan serta orientasi masa depan pemerintah. Pilar kedua infrastruktur yang diturunkan menjadi infrastruktur transportasi dan infrastruktur utilitas. Kemudian pilar keenam keterampilan, yang terdiri dari keterampilan tenaga kerja saat ini dan keterampilan tenaga kerja masa depan. Sedangkan pilar ketujuh yaitu pasar barang dan jasa yang meliputi persaingan pasar domestik dan keterbukaan perdagangan. Pilar kedelapan pasar tenaga kerja dapat dijelaskan dalam bentuk fleksibilitas serta meritokrasi dan insentif. Pilar kesembilan yaitu sistem keuangan, yang dapat ditinjau berdasar aspek kedalaman dan stabilitas. Pilar kesebelas dinamika bisnis dapat dijelaskan oleh persyaratan administratif dan budaya kewirausahaan. Kemudian pilar keduabelas kemampuan inovasi dapat dijelaskan oleh keragaman dan kolaborasi, penelitian dan pengembangan serta komersialisasi. Gambar berikut ini merupakan penjabaran Indeks daya saing global sebagaimana dikemukakan oleh (Schwab, 2019).

Dimasukkannya aspek budaya kewirausahaan terutama pada pilar kesebelas ini menandakan bahwa kewirausahaan sangat penting untuk mewujudkan suatu bangsa menuju kemajuan khususnya terkait dengan daya saing. Kewirausahaan mampu menciptakan pasar baru atas suatu produk yang dihasilkan oleh suatu negara, dan kemampuan inovasi dari seorang wirausahawan ini sekaligus akan melahirkan permintaan

konsumen sehingga produk yang dihasilkan oleh perusahaan di suatu negara dapat diserap oleh pasar dan akan terwujud siklus aliran pendapatan yang lancar. Disamping itu, terserapnya produk yang dihasilkan perusahaan pada periode tertentu akan dapat meminimalisir pengangguran sumber daya sehingga factor-faktor produksi dapat dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya saing bangsa.

Grafik di bawah ini memberikan pemetaan yang jelas tentang indikator-indikator Global Competitiveness Index (12 indikator) berikut penjelasannya secara ringkas terhadap masing-masing indikator. Daya saing tidak saja terkait dengan aspek ekonomi (makro maupun mikroekonomi), tetapi juga terkait dengan aspek non-ekonomi misalnya institusi, prasarana dan sarana, kesehatan, pendidikan, pasar barang dan pasar tenaga kerja, pasar uang dan tentunya inovasi. Inovasi merupakan aspek paling penting karena pada indikator selain inovasi ini dapat tertata dengan baik ketika terdapat inovasi-inovasi dalam proses manajerialnya.



Gambar 3. Global Competitiveness Index

Bukti secara teoretis bahwa daya saing dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat suatu negara

didasarkan pada penjelasan Risnain (2016) bahwa konstitusi Indonesia dengan jelas menginginkan terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur serta memajukan kesejahteraan umum sehingga diperlukan daya saing bangsa yang meliputi 12 pilar di atas. Demikian juga dengan Zuhdiyaty (2020) yang mengemukakan bahwa Global Competitiveness Index memiliki hubungan yang sangat erat dengan Indeks Pembangunan Manusia.

Secara lebih teknis berikut ini dikemukakan penelitian terdahulu yang relevan dalam kaitannya dengan daya saing dan kesejahteraan suatu bangsa yang diukur oleh indeks pembangunan manusia. Cernescu et al. (2018) dalam studinya menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari kemampuan negara tersebut dalam menghasilkan pendapatan khususnya sebagai akibat dari kuatnya iklim investasi. Disamping itu, kontribusi suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh daya saingnya pada dunia global menjadi salah satu penentu kekayaan dan asset suatu negara. Inilah pentingnya mempelajari daya saing dimana daya saing pada tingkat mikro yaitu perusahaan berkontribusi positif dalam meningkatkan daya saing di tingkat makro yaitu suatu negara.

Studi yang menggunakan data time series selama 10 tahun yaitu 2007 sampai dengan 2016 ini mengemukakan bahwa kualitas dan kuantitas perusahaan menjadi kekuatan suatu negara sehingga diperlukan keunggulan kompetitif melalui tindakan inovasi. Inovasi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi paling penting khususnya pada negara-negara terpilih yaitu Kroasia, Hongaria dan Rumania disamping factor-faktor lainnya yaitu: akses pembiayaan, birokrasi pemerintah yang tidak efisien, tarif pajak, tenaga kerja yang tidak berpendidikan, korupsi, peraturan pajak, inflasi, kejahatan dan pencurian, kesehatan masyarakat yang buruk, peraturan mata uang asing, ketidakstabilan pemerintah serta ketidakstabilan kebijakan.

Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa kewirausahaan berbasis sains sangat penting dalam ekonomi modern sekarang ini. Mengingat kewirausahaan merupakan embrio lahirnya inovasi-inovasi baru maka diperlukan partisipasi dan keberpihakan khususnya oleh dunia perguruan tinggi (Universitas) melalui pembelajaran kewirausahaan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dengan memacu pengembangan produk, dengan menciptakan industri baru, dan dengan berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan kekayaan.

Pada saat ini, kewirausahaan memainkan peran yang sangat penting di universitas untuk mengalihkan fokus mereka dari pengajaran dan penelitian ke kewirausahaan, yang diperlukan untuk mentransfer pengetahuan dan mendorong ekonomi lokal. Untuk meningkatkan tingkat keekonomian, perguruan tinggi harus mempersiapkan lulusan calon manajer dengan mengembangkan kompetensi yang tepat guna menciptakan *spin-off* dan *start-up*. Penelitian tersebut juga merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk mendorong kolaborasi yang signifikan antara universitas dengan perusahaan-perusahaan dengan mempromosikan jaringan inovatif.

Penelitian Hamid (2019) tentang hubungan kausalitas Human Development Index dengan Global Competitiveness Index pada sepuluh negara di ASEAN yaitu: Brunei Darussalam, Cambodia, Malaysia, Indonesia, Singapura, Laos, Thailand, Myanmar, Philippines dan Vietnam. Studi ini diarahkan untuk menguji pengaruh Human Development Index terhadap Global Competitiveness Index. Metode analisis yang digunakan yaitu kausalitas granger dan regresi data panel. Sedangkan hasil studi menemukan bahwa terdapat hubungan satu arah Indeks Daya Saing Global dan Gross National Income per Capita, dimana Indeks Daya Saing Global mendorong Gross National Income per Capita sepuluh negara ASEAN dalam kurun waktu tahun 2010-2015.

Mengingat Gross National Income per Capita merupakan komponen dari Human Development Index sebagaimana dikemukakan oleh United Nation Development Program, (2020) maka hasil penelitian Hamid (2019) ini dapat disimpulkan bahwa peningkatan Global Competitiveness Index mendorong peningkatan dalam hal Human Development Index.

Hasil penelitian terhadap 28 negara Uni Eropa yaitu: Austria (AT), Belgium (BE), Bulgaria (BG), Croatia (HR), Cyprus (CY), Czech Republic (CZ), Denmark (DK), Estonia (EE), Finland (FI), France (FR), Germany (DE), Greece (EL), Hungary (HU), Ireland (IE), Italy (IT), Latvia (LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), Malta (MT), the Netherlands (NL), Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovakia (SK), Slovenia (SI), Spain (ES), Sweden (SE), and the United Kingdom (UK) dapat dikemukakan bahwa terdapat hubungan signifikan secara statistik antara Global Competitiveness Index dan Human Development Index. Dengan demikian hipotesis penelitian yang diajukan oleh Kiseláková et al. (2019) menggunakan data tahun 2006-2017 ini teruji secara statistik.

Studi empiris tentang korelasi Global Competitiveness Index (2005-2012) dan Human Development Index (2006-2012) pada 102 negara di dunia termasuk Indonesia dapat dijelaskan bahwa terdapat korelasi positif dan signifikan Global Competitiveness Index dengan Human Development Index (Lonska & Boronenko, 2015). Artinya peningkatan Global Competitiveness Index berhubungan positif dengan Human Development Index, hasil ini mengisyaratkan bahwa hipotesis penelitian dinyatakan teruji.

Namun demikian, terdapat keunikan dalam penelitian tersebut yaitu terbaginya menjadi tiga kelompok negara-negara di dunia yaitu: kelompok pertama disebut dengan pertumbuhan, kelompok kedua penurunan dan kelompok ketiga kelompok tetap. Kelompok atau kluster pertumbuhan yaitu sebanyak 44 negara di dunia yang mengalami peningkatan baik pada aspek Global Competitiveness Index maupun Human Development Indexnya. Ke-44 negara tersebut yaitu: Cambodia, Ethiopia, Gatar, Marocco, Brazil, Ecuador, Paraguay, Kuwait, Philippines, Mongolia, Mexico, Benin, Bolivia, Tajikistan, Cameroon, Mauritius, Armenia, Chad, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Sri Lanka, Tanzania, Bulgaria, Kenya, Indonesia, Bahrain, Peru, Kazakhstan, Dominican, Republic Guyana, Bangladesh, Vietnam, Uruguay, Panama, Mali, Ukraine, Uganda, Guatemala, Turkey, Albania, Timor-Leste, Gambia dan China.

Yang termasuk dalam kelompok atau kluster penurunan terdapat 22 negara yaitu: Slovenia, France, Czech Republic, El Salvador, Ireland, Venezuela, Argentina, Slovak Republic, Spain, Portugal, Israel, Australia, Hungaria, Chile, Egypt, Finland, Estonia, Korea, Jordan, Greece, Denmark dan Iceland. Sedangkan yang masuk pada kluster stagnan terdapat 36 negara yaitu: Pakistan, Trinidad and Tobago, Italy, Mozambique, Belgium, India, Croatia, Malaysia, Sweden, Algeria, Norway, Switzerland, Luxembourg, South Africa, Hong Kong, United Kingdom, Malta, Thailand, Poland, Namibia, Madagascar, Cyprus, Germany, Kyrgyz Republic, Romania, Zimbabwe, Russian Federation, Lithuania, Japan, Netherlands, Colombia, Latvia, Botswana, Austria, Canada dan New Zealand.

Penelitian Muchdie (2017) yang mengkaji tentang hubungan kebahagiaan, daya saing global dan pembangun manusia pada 123 negara di dunia. Penelitian tersebut menempatkan kebahagiaan sebagai variabel terikat dan pembangunan manusia sebagai variabel bebas dengan daya saing global sebagai variabel moderator. Temuan penelitian menunjukkan

bahwa terdapat korelasi positif dan sangat kuat pembangunan manusia dengan kebahagiaan. Atau dengan kata lain, negara yang memiliki indeks kebahagiaan tinggi adalah negara dengan indeks pembangunan manusia yang tinggi.

Pembangunan manusia dengan daya saing global berkorelasi positif dan sangat kuat, serta korelasi daya saing global dengan kebahagiaan juga positif dan kuat. Dampak langsung pembangunan manusia terhadap kebahagiaan adalah positif dan signifikan. Dampak tidak langsung dari perkembangan manusia terhadap kebahagiaan, sekali lagi, adalah positif dan signifikan. Aspek kebahagiaan menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat, dengan demikian semakin sejahtera masyarakat maka mereka semakin bahagia dalam hidup dan kehidupannya. Kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting dan hal ini dapat terwujud manakala suatu negara memiliki daya saing. Daya saing bangsa menjadi kunci dalam kaitannya dengan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.

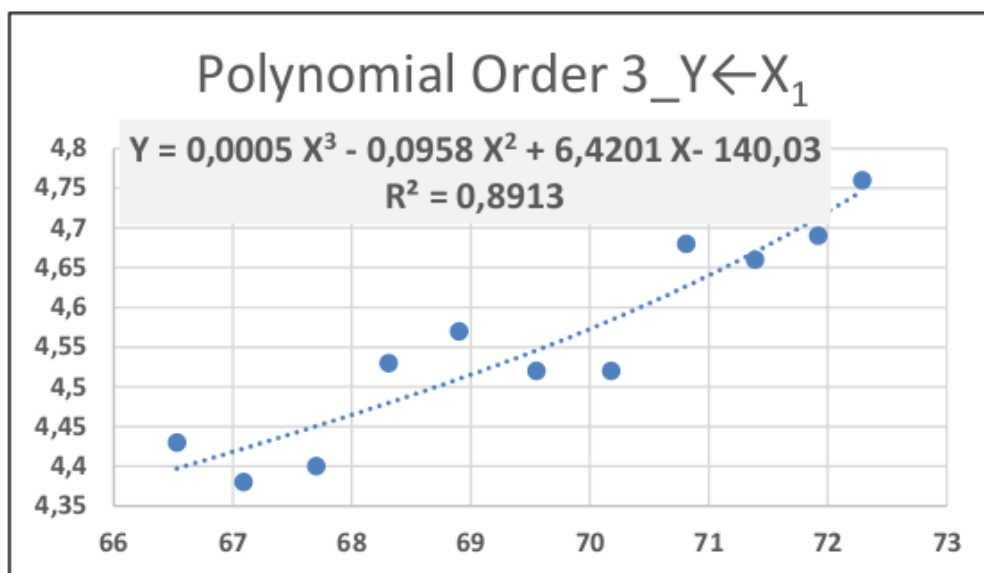
Studi yang sama sebagaimana dilakukan oleh Ülengin et al. (2011) tentang daya saing suatu bangsa dan implikasinya terhadap pembangunan manusia pada 45 negara yaitu: Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgium, Brazil, Canada, China, Colombia, Denmark, Egypt, Ethiopia, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Kenya, Korea, Mexico, Morocco, Netherlands, Nigeria, Norway, Pakistan, Peru, Philippines, Poland, Russian Federation, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Tanzania, Thailand, Turkey, Uganda, Ukraine, United Kingdom, United States, Venezuela dan Vietnam.

Penelitian tersebut meyakini bahwa jika daya saing suatu negara dikelola dengan baik maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan manusia di negara tersebut. Dengan indikator utama yaitu daya saing global sebagai variabel input dan indikator indeks pembangunan manusia sebagai variabel output, hasil studi menemukan bahwa hubungan pembangunan manusia dengan daya saing menunjukkan interaksi dua arah. Hal ini dapat dijelaskan bahwa aspek pendidikan, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting untuk meningkatkan daya saing. Namun demikian daya saing juga menjadi faktor kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tahun tertentu dan negara tertentu.

Studi empiris di atas memberikan gambaran yang jelas tentang pola

hubungan indeks daya saing global di beberapa negara termasuk juga Indonesia dengan kesejahteraan masyarakat yang diukur oleh Human Development Index. Sumber data yang digunakan yaitu time series dan sama dengan penelitian ini yang menggunakan sumber data time series, namun demikian terdapat perbedaan dalam kaitannya dengan periodisasi penelitian dan alat analisis yang digunakan. Dimana penelitian ini menggunakan data tahunan mulai tahun 2010 sampai dengan 2021 sehingga datanya lebih up to date. Perbedaan berikutnya yaitu analisis data menggunakan regresi nonparametrik dengan regresi polynomial.

Gambar di bawah ini menunjukkan hasil analisis data dengan regresi polynomial yang menguji pengaruh indeks daya saing global Indonesia dengan Human Development Index menggunakan order 3. Pemilihan order 3 didasarkan pada pertimbangan hasil uji koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,8913, hasil ini lebih besar dibandingkan dengan nilai R^2 jika menggunakan polynomial order 2.



Grafik 2. Pengaruh Global Competitiveness Index terhadap Human Development Index

Berdasar grafik di atas dapat dijelaskan bahwa Global Competitiveness Index Indonesia berpengaruh positif terhadap Human Development Index Indonesia dengan kontribusi sebesar 89,13%. Hasil studi ini relevan dengan penelitian Cernescu et al. (2018); Hamid (2019); Kiseláková et al. (2019); Lonska & Boronenko (2015); Muchdie (2017); Ülengin et al. (2011); United Nation Development Program (2020) it does not create economic benefits

until it is incorporated into actual products, services and processes, which are commercialized. National and European investments in R&D are not always strongly correlated with average incomes. According to the Global Competitiveness Report 2015-2016, Romania together with Croatia and Hungary was in the transition from stage 2 (efficiency-driven stage of development meskipun dalam lokus penelitian yang berbeda maupun periode penelitian yang berbeda.

Studi ini juga relevan dengan penelitian Risnain (2016) dan Zuhdiyaty (2020) bahwa daya saing bangsa baik itu ditinjau dari aspek ekonomi maupun non ekonomi sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan dalam bentuk indeks pembangunan manusia. Dan yang perlu diperhatikan yaitu: kualitas institusi memiliki pengaruh yang kuat terhadap daya saing dan pertumbuhan. Infrastruktur yang efisien sangat penting untuk memastikan berfungsinya perekonomian secara efektif untuk membangun daya saing bangsa. Infrastruktur ini meliputi jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, transportasi udara yang berkualitas, pasokan listrik dan jaringan telekomunikasi.

Stabilitas lingkungan makroekonomi penting bagi aktivitas bisnis dan oleh karenanya sangat mempengaruhi daya saing suatu negara. Demikian juga dengan kesehatan dan pendidikan, dimana tenaga kerja yang sehat dan berpendidikan sangat penting untuk daya saing dan produktivitas suatu negara. Efisiensi pasar juga tergantung pada kondisi permintaan seperti orientasi pelanggan dan kecanggihan pembeli, oleh karenanya bagi pelaku ekonomi diperlukan inovasi yang berorientasi pada pelanggan.

Efisiensi dan fleksibilitas pasar tenaga kerja sangat penting untuk memastikan bahwa pekerja dialokasikan untuk penggunaan mereka yang paling efektif dalam perekonomian. Sementara itu sektor keuangan yang efisien yang menyalurkan sumber daya ke proyek-proyek kewirausahaan atau investasi juga mempengaruhi daya saing. Kemudian dalam dunia global saat ini, teknologi semakin penting bagi perusahaan untuk bersaing dan berkembang untuk mempertahankan peningkatan produktivitas industrinya.

Ukuran pasar mempengaruhi produktivitas karena pasar yang besar memungkinkan perusahaan untuk mengeksploitasi skala ekonomi sehingga daya saing meningkat. Sedangkan kualitas jaringan bisnis keseluruhan suatu negara dan kualitas operasi dan strategi masing-masing perusahaan sangat penting untuk membangun daya saing bangsa. Sedangkan inovasi baik teknologi maupun non-teknologi baru dapat meningkatkan produktivitas sehingga daya saing suatu bangsa mengalami peningkatan.



BAB 4

KEWIRAUSAHAAN GLOBAL

Dalam memahami konsep pembangunan ekonomi, secara keseluruhan Schumpeter (dalam Ácsc & Szerb, 2009) menyebutkan bahwa proses pertumbuhan ekonomi meliputi peran kewirausahaan didalamnya. Secara global peran kewirausahaan menentukan seberapa besar tingkat pembangunan ekonomi suatu negara. Baumol (1990) (dalam Ácsc & Szerb, 2009) mencatat bahwa secara historis semua perusahaan memiliki persediaan aktivitas kewirausahaan yang konstan, tetapi aktivitas kewirausahaan dilakukan secara tidak merata antara kewirausahaan yang produktif, tidak produktif, dan destruktif. Kewirausahaan produktif yang memperkuat pembangunan ekonomi (Acemoglu dan Johnson, 2005) (dalam Ácsc & Szerb, 2009).

Kegiatan kewirausahaan ini melewati fase yang berfokus pada efisiensi dan berpuncak pada inovasi tingkat tinggi dengan derajat kewirausahaan sebagai institusi yang berkembang sepenuhnya, saling ketergantungan antara pembangunan ekonomi dan perubahan sosial-politik umumnya diakui oleh para ilmuwan sosial. Lingkungan ini dicirikan oleh saling ketergantungan antara pembangunan ekonomi dan institusi, yang mempengaruhi karakteristik lain seperti kualitas tata kelola, akses ke modal dan sumber daya lainnya dan persepsi pengusaha. Kelembagaan merupakan penentu penting dari perilaku ekonomi dan transaksi ekonomi secara umum dan dapat memiliki efek langsung dan tidak langsung pada penawaran dan permintaan pengusaha.

Salah satu perkembangannya adalah bidang ekonomi. Sektor ini merupakan jantung dari ekonomi makro dengan mendukung kesejahteraan bangsa. Peningkatan pertumbuhan ekonomi terlihat dari fenomena peningkatan produk industri dan produknya. Berbagai jenis produksi menggambarkan betapa luasnya efektifitas kewirausahaan dan dilandasi oleh sikap manusia sebagai wirausahawan dalam sumber daya manusia (SDM) dalam kegiatan wirausaha yang menjaga kepribadian bangsa.

Kepribadian bangsa secara filosofis terkandung dalam dasar negara dan dalam falsafah bangsa. Membuka setiap manusia, apapun profesinya dengan latar belakang masing-masing, termasuk pemberdayaan sumber daya manusia wirausaha, harus mampu menciptakan perannya sendiri sebagai warga negara. Untuk itu, proses dinamis kewirausahaan harus berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses pertumbuhan ekonomi. Manusia adalah agen dan sasaran dalam proses pembangunan Paripurna suatu bangsa. pembangunan bangsa (Rahmat, 2005).

Kecakapan hidup dalam kegiatan ekonomi adalah sebuah kecakapan hidup yang harus dimiliki oleh setiap warga negara dan diperlukan seseorang untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembangunan sumber daya manusia bangsa harus memiliki orientasi hidup karya niaga yang nyata di masa depan, karena kerja niaga yang sesungguhnya tidak dilakukan sementara tetapi untuk kehidupan berkreasi dalam pembangunan bangsa. Dalam melakukan kegiatan Sumber Daya Manusia Wirausaha (SDMW) yang mencakup *basic skill* dan *instrument skill*. Karena kerja korporat yang sesungguhnya tidak dilakukan sementara tetapi sepanjang hayat untuk berkreasi dalam pembangunan bangsa, maka seseorang yang berjiwa SDMW akan melakukan apa saja untuk menyukseskan.

Menurut Rahmat (2005) kewirausahaan memiliki kontribusi dalam meningkatkan terhadap pembangunan ekonomi suatu bangsa, sehingga kewirausahaan menurut Lucky et al., (2017) adalah jiwa yang dapat dipelajari dan diajarkan. Mereka yang berjiwa wirausaha biasanya memiliki potensi untuk menjadi seorang wirausahawan yang memiliki ciri yaitu kemampuan memimpin, kemandirian, kerjasama tim, kreativitas dan inovasi, serta keberanian menghadapi dan mempertaruhkan keputusan yang diambil yang menjadi dasar dari tindakan nyata yang diambil.

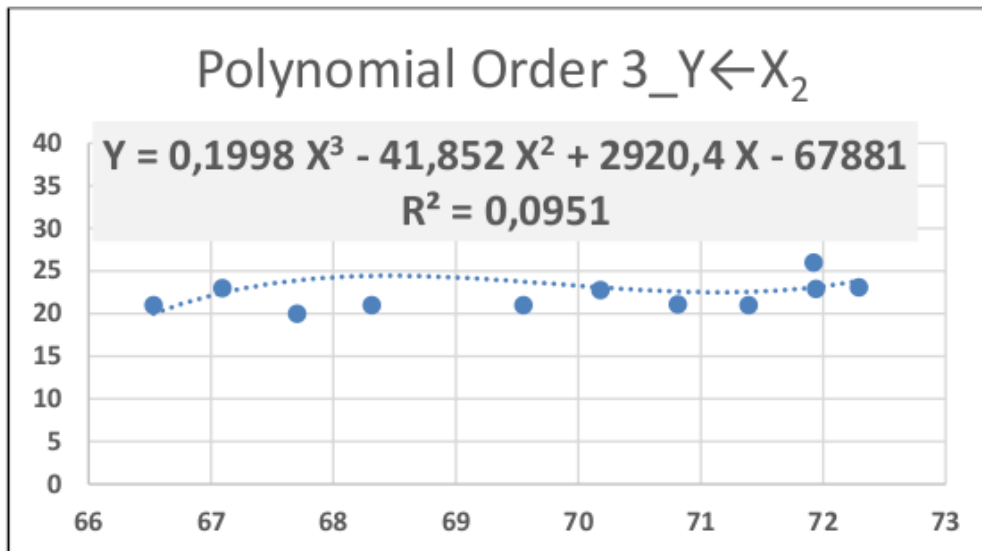
Pembangunan di Indonesia dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya dibarengi dengan infrastruktur yang memadai, terutama untuk menyediakan lapangan kerja pada sektor-sektor strategis misalnya sektor industri manufaktur skala besar. Terbatasnya kesempatan kerja berdampak pada meningkatnya angka pengangguran di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia ada sebanyak 9,1 juta orang per Agustus 2021, pada rilisan Badan Pusat Statistik periode sebelumnya pengangguran tingkat sarjana adalah sebesar 999,543 jiwa atau hampir mendekati 1 juta orang yang tidak memiliki pekerjaan.

Sehingga untuk menekan angka pengangguran tentu saja banyak yang harus dipersiapkan dan juga banyak yang perlu diperhatikan salah satunya adalah peran pemerintah, namun selain dari itu, hal yang lebih utama adalah *stakeholder* dan *shareholder*. Darisini lah peran pemerintah dalam menggalakan program kewirausahaan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional serta dalam rangka memanfaatkan Sumber Daya Manusia Wirausaha diperlukan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lucky et al., (2017) bahwa peningkatan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan tidak akan terwujud jika kita hanya mengandalkan industri makro sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi nasional. Krisis ekonomi global dan persaingan global telah memberikan dampak yang sangat signifikan tidak hanya pada industri manufaktur besar, tetapi juga pada krisis moneter industri menengah Pada tahun 1998, Indonesia mampu pulih dengan cepat dari krisis ekonomi dengan mengutamakan kecil dan usaha menengah (UKM).

Pemberdayaan usaha kecil menengah melalui pengelolaan jiwa kewirausahaan harus mampu menciptakan usaha kecil menengah yang mandiri dan kuat dalam menghadapi persaingan usaha khususnya produk global khususnya dari China. sehingga menghasilkan produk yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi. Kemandirian usaha kecil memerlukan perlindungan pengelolaan perusahaan agar dapat dengan mudah menjalankan usaha, serta peran serta pemerintah daerah, perguruan tinggi dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan adanya peraturan daerah tentang pengelolaan usaha kecil. mampu melindungi para pelaku usaha kecil.

Pada gambar grafik di bawah ini, dijelaskan berkaitan dengan hubungan antara kewirausahaan global dengan Human Development Index menggunakan order 3. Pemilihan order 3 didasarkan pada pertimbangan hasil uji koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,0951 hasil ini lebih besar dibandingkan dengan nilai R^2 jika menggunakan polinomial order 2.



Grafik 3. Pengaruh Kewirausahaan Global terhadap Human Development Index

Pada grafik tersebut diatas dijelaskan bahwa Kewirausahaan Global berpengaruh positif terhadap *Human Development Index* Indonesia dengan kontribusi sebesar 0.09%, artinya hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Astuti (2016) bahwa kewirausahaan merupakan isu terpenting dalam perekonomian negara berkembang seperti Indonesia. Kelompok usaha yang dikenal dengan human capital berperan dalam kemajuan perekonomian. Kemajuan Jepang dan Cina, misalnya, didorong oleh kewirausahaan. Gelombang wirausaha yang telah mengubah wajahnya negara-negara ini adalah negara-negara dengan tingkat keberhasilan ekonomi tertinggi di dunia.

Wirausahawan adalah seseorang yang memiliki semangat dan kapasitas tertentu untuk berkreasi dan berinovasi. Mereka memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*ability to create new and different*) atau keterampilan kreatif dan inovatif. Selain itu, pada penelitian yang dilakukan Ballesta et al. (2020) bahwa kewirausahaan yang inovatif meningkatkan kualitas hidup dalam dimensi

yang diukur dengan Indeks Kemajuan Sosial dan Indeks Pembangunan Manusia yang dimodifikasi. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa dampak sosial dari kewirausahaan terutama bergantung pada faktor-faktor seperti tahap pembangunan suatu negara, sektor ekonomi di mana kegiatan kewirausahaan dilakukan, dan motivasi yang mengarahkan orang untuk menjadi pengusaha (Acs, Audretsch, Braunerhjelm & Carlsson, 2012; Acs & Lantai, 2004; Audretsch, 2007; Audretsch, Bonte, & Keilbach, 2008; Urbano & Aparicio, 2016) (dalam Ballesta et al., 2020).

Jenis wirausaha yang menghasilkan dampak terbesar pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi adalah peluang kewirausahaan yang berorientasi pada inovasi (Acs et al., 2012; Acs & Lantai, 2004; Baumol, 1990; Levie, Autio, Acs, & Hart, 2014; Schumpeter, 1939; Shane & Venkataraman, 2000; Wennkers, Van Wennkers, Thurik, & Reynolds, 2005) (dalam Ballesta et al., 2020). Namun, teori perkembangan telah diperluas untuk memasukkan argumen alternatif untuk argumen yang mendukung pertumbuhan ekonomi sebagai penggerak kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian juga sejalan dengan penelitian Doan (2021) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kedua indeks (*Human Development Index* dan *Global Entrepreneurship Index*) melalui metode analisis statistik dan analisis matematis. Selain itu, pembangunan manusia memiliki dampak positif terhadap pembangunan manusia. negara. Efek ini cukup kuat: ketika indeks pembangunan manusia meningkat satu unit, indeks kewirausahaan global akan meningkat 106 unit. Selain itu, hasil metode grafik pada hubungan antara kewirausahaan dan pembangunan manusia juga menunjukkan bahwa untuk negara dengan pembangunan manusia yang rendah dan sedang ($IPM < 0 > 0,8$), pembangunan manusia akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kewirausahaan. pengambil keputusan nasional untuk mengembangkan kewirausahaan dan kebijakan pembangunan manusia yang sesuai dengan realitas negara mereka.

Kewirausahaan secara global memiliki peran penting dalam proses pembangunan ekonomi serta keadilan sosial dalam suatu negara, kewirausahaan menciptakan kemakmuran, lapangan pekerjaan serta pertumbuhan ekonomi, sehingga pembangunan yang cocok dalam sebuah proses ekonomi adalah adanya lingkungan bisnis dengan mempromosikan sisi kewirausahaan yang dalam hal ini proses promosi dilakukan dan

merupakan tugas penting dari masing-masing pemerintah dalam suatu negara.

Salah satu faktor yang mendorong kewirausahaan adalah pengembangan manusia. Pembangunan manusia di daerah yang berbeda akan berdampak berbeda pada kewirausahaan. Beberapa penelitian telah menyimpulkan bahwa sebagian besar pengusaha dengan pertumbuhan tinggi cenderung terkonsentrasi di sekitar daerah perkotaan (Ács dan Armington, 2006 (dalam Doan, 2021)) atau lembaga penelitian besar (Audretsch dan Lehmann, 2005). Selain itu, beberapa faktor kualitas hidup (seperti pendidikan, perawatan kesehatan, iklim, hiburan) juga penting dalam keputusan tentang lokasi untuk bisnis (Pittman, 2006 (dalam Doan, 2021)).

Kewirausahaan telah dikenal secara historis sejak diperkenalkan oleh Richard Castillon pada tahun 1755. Di luar negeri, istilah kewirausahaan telah dikenal sejak abad ke-16, sedangkan di Indonesia baru dikenal pada akhir abad ke-20. Pada tahun 1950-an di berbagai negara seperti Eropa, Amerika dan Kanada. Sejak tahun 1970-an, banyak universitas juga telah mengajarkan kewirausahaan atau manajemen usaha kecil. Pada 1980-an, hampir 500 sekolah di Amerika Serikat memberikan pelatihan kewirausahaan. Di Indonesia, kewirausahaan hanya dipelajari di sekolah atau perguruan tinggi.

Sejalan dengan perkembangan dan tantangan seperti krisis ekonomi, pemahaman kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan formal di semua bidang masyarakat wirausaha berkembang. Kewirausahaan adalah hal-hal yang berhubungan dengan kewirausahaan. Sedangkan wira berarti keberanian dan komitmen berarti kegiatan usaha atau non usaha, kewirausahaan juga dapat diartikan sebagai keberanian seseorang untuk menjalankan usaha.

Kewirausahaan secara umum adalah suatu proses melakukan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda (*innovative*) yang berguna untuk menambah nilai. Dalam bahasa Inggris, *entrepreneurship is an entrepreneur*, istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Richard Cantillon, seorang ekonom Perancis. Menurutnya, pengusaha adalah “agen yang membeli alat-alat produksi dengan harga tertentu untuk menggabungkannya”. Dalam waktu yang tidak lama lagi, ekonom Prancis lainnya, Jean Baptista Say, menambahkan definisi Cantillon pada konsep wirausaha sebagai pemimpin.

Kegiatan kewirausahaan ini melewati fase yang berfokus pada efisiensi dan berpuncak pada inovasi tingkat tinggi dengan derajat kewirausahaan sebagai institusi yang berkembang sepenuhnya, saling ketergantungan antara pembangunan ekonomi dan perubahan sosial-politik umumnya diakui oleh para ilmuwan sosial. Lingkungan ini dicirikan oleh saling ketergantungan antara pembangunan ekonomi dan institusi, yang mempengaruhi karakteristik lain seperti kualitas tata kelola, akses ke modal dan sumber daya lainnya dan persepsi pengusaha. Kelembagaan merupakan penentu penting dari perilaku ekonomi dan transaksi ekonomi secara umum dan dapat memiliki efek langsung dan tidak langsung pada penawaran dan permintaan pengusaha.

Indonesia masih dianggap sebagai negara berkembang, karena berbagai masalah yang ada di Indonesia, misalnya rendahnya pendapatan penduduk, banyaknya pengangguran dan kondisi ekonomi dan sosial yang tertinggal dibandingkan dengan negara maju. Banyak persoalan yang perlu ditangani oleh pemerintah Indonesia untuk dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Kepadatan penduduk di kota-kota besar seperti Jakarta, misalnya, membatasi kesempatan kerja. Oleh karena itu, penduduk yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan kurang memiliki keterampilan berwirausaha akan memiliki pendapatan yang rendah dan tidak akan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.

Kegiatan kewirausahaan dianggap penting guna mengurangi masalah ekonomi serta masalah sosial pada suatu bangsa, pada negara berkembang seperti Indonesia saat ini Usaha Kecil dan Menengah memiliki peran yang penting dalam mengembangkan proses pertumbuhan ekonomi. Meskipun seringkali diyakini bahwa kewirausahaan memberikan gambaran yang agak ekstrim, seperti ketidakpastian yang sangat tinggi dan bahkan permusuhan. Padahal, banyak dampak positif yang bersumber dari kewirausahaan. Kewirausahaan itu sendiri adalah pemanfaatan peluang bisnis dalam hubungan yang diadakan oleh seorang individu.

Dalam memahami konsep pembangunan ekonomi, secara keseluruhan Ácsc & Szerb (2009) menyebutkan bahwa proses pertumbuhan ekonomi meliputi peran kewirausahaan didalamnya. Secara global peran kewirausahaan menentukan seberapa besar tingkat pembangunan ekonomi suatu negara. Bahkan secara historis semua perusahaan memiliki persediaan aktivitas kewirausahaan yang konstan, tetapi aktivitas kewirausahaan dilakukan secara tidak merata antara kewirausahaan yang

produktif, tidak produktif, dan destruktif. kewirausahaan produktif yang memperkuat pembangunan ekonomi.

Berdasarkan peran sebuah sumber daya manusia dan peran kewirausahaan terhadap pembangunan ekonomi secara lebih lanjut, makna dari kegiatan kewirausahaan menurut Lucky & Rosmadi (2017) yaitu jiwa yang dapat dipelajari dan diajarkan. Mereka yang berjiwa wirausaha biasanya memiliki potensi untuk menjadi seorang wirausahawan tetapi itu tidak menjamin menjadi seorang wirausahawan, dan wirausahawan biasanya memiliki jiwa wirausaha seseorang yang memiliki jiwa wirausaha. adalah kemampuan memimpin, kemandirian, kerjasama tim, kreativitas dan inovasi, serta keberanian menghadapi dan mempertaruhkan keputusan yang diambil yang menjadi dasar dari tindakan nyata yang diambil.

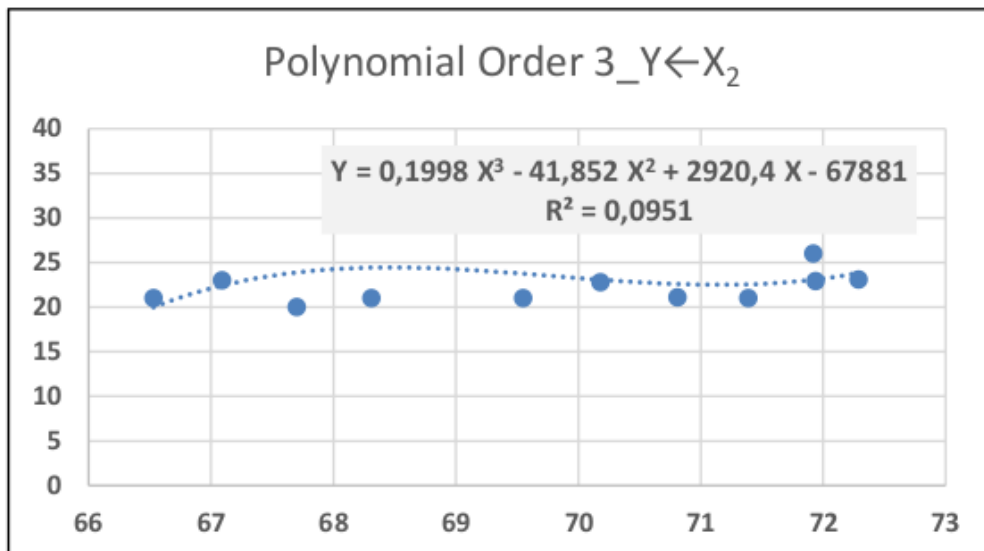
Pembangunan di Indonesia dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dibarengi dengan infrastruktur yang memadai, terutama untuk menyediakan lapangan kerja, terutama di sektor industri dan manufaktur skala besar. Terbatasnya kesempatan kerja berdampak pada meningkatnya angka pengangguran di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia ada sebanyak 9,1 juta orang per Agustus 2021, pada rilis Badan Pusat Statistika periode sebelumnya pengangguran tingkat sarjana adalah sebesar 999,543 Jiwa atau hampir mendekati 1 Juta orang yang tidak memiliki pekerjaan.

Sehingga untuk menekan angka pengangguran tentu saja banyak yang harus dipersiapkan dan juga banyak yang perlu diperhatikan salah satunya adalah peran pemerintah, namun selain dariapda itu, hal yang lebih utama adalah *stakeholder* dan *shareholder*. Darisini lah peran pemerintah dalam menggalakan program kewirausahaan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional serta dalam rangka memanfaatkan Sumber Daya Manusia Wirausaha diperlukan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lucky & Rosmadi (2017) bahwa peningkatan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan tidak akan terwujud jika kita hanya mengandalkan industri makro sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi nasional. Krisis ekonomi global dan persaingan global telah memberikan dampak yang sangat signifikan tidak hanya pada industri manufaktur besar, tetapi juga pada krisis moneter industri menengah Pada tahun 1998, Indonesia mampu pulih dengan cepat dari krisis ekonomi dengan mengutamakan UMKM.

Pemberdayaan usaha kecil menengah melalui pengelolaan jiwa kewirausahaan harus mampu menciptakan usaha kecil menengah yang mandiri dan kuat dalam menghadapi persaingan usaha khususnya produk global khususnya dari China. Sehingga menghasilkan produk yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi. Kemandirian usaha kecil memerlukan perlindungan pengelolaan perusahaan agar dapat dengan mudah menjalankan usaha, serta peran serta pemerintah daerah, perguruan tinggi dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan adanya peraturan daerah tentang pengelolaan usaha kecil. mampu melindungi para pelaku usaha kecil.

Pada grafik dibawah ini dijelaskan berkaitan dengan hubungan antara Kewirausahaan global dengan *Human Development Index* menggunakan order 3 dengan Regresi Polynomial. Pemilihan order 3 didasarkan pada pertimbangan hasil uji koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,0951 hasil ini lebih besar dibandingkan dengan nilai R^2 jika menggunakan polynomial order 3.



Grafik 4. Pengaruh Kewirausahaan Global terhadap Human Development Index

Pada grafik diatas dijelaskan bahwa Kewirausahaan Global berpengaruh positif terhadap Human Development Index Indonesia dengan kontribusi sebesar 0.09%, artinya hal ini sejalan dengan hasil penelitian Astuti (2013) bahwa kewirausahaan merupakan isu terpenting dalam perekonomian negara berkembang seperti Indonesia. Kelompok usaha yang dikenal dengan *human capital* berperan dalam kemajuan

perekonomian. Kemajuan Jepang dan Cina misalnya, didorong oleh kewirausahaan dimana mereka memiliki semangat dan kapasitas tertentu untuk berkreasi dan berinovasi. Seseorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*ability to create new and different*) atau keterampilan kreatif dan inovatif inilah yang disebut sebagai seorang wirausahawan.

Studi Ballesta et al., (2020) mengemukakan bahwa kewirausahaan yang inovatif meningkatkan kualitas hidup dalam dimensi yang diukur oleh Indeks Kemajuan Sosial dan Indeks Pembangunan Manusia yang dimodifikasi. Kewirausahaan kebutuhan tidak mendukung peningkatan pembangunan manusia, di setidaknya dalam dimensi yang diukur oleh dua indeks, karena ini adalah subsisten tipe wirausaha. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa dampak sosial dari kewirausahaan terutama bergantung pada faktor-faktor seperti tahap pembangunan suatu negara, sektor ekonomi di mana kegiatan kewirausahaan dilakukan dan motivasi yang mengarahkan orang untuk menjadi pengusaha (Ballesta et al., 2020).

Selanjutnya Ballesta et al., (2020) memperjelas bahwa jenis wirausaha yang menghasilkan dampak terbesar pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi adalah peluang kewirausahaan yang berorientasi pada inovasi. Namun teori perkembangan telah diperluas untuk memasukkan argumen alternatif untuk argumen yang mendukung pertumbuhan ekonomi sebagai penggerak kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian juga sejalan dengan studi Doan (2021) yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kedua indeks (*Human Development Index* dan *Global Entrepreneurship Index*) melalui metode analisis statistik dan analisis matematis. Selain itu, pembangunan manusia memiliki dampak positif terhadap pembangunan manusia suatu negara. Efek ini cukup kuat: ketika indeks pembangunan manusia meningkat satu unit, indeks kewirausahaan global akan meningkat 106 unit. Selain itu, hasil metode grafik pada hubungan antara kewirausahaan dan pembangunan manusia juga menunjukkan bahwa untuk negara dengan pembangunan manusia yang rendah dan sedang (IPM <0> 0,8). Pembangunan manusia akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kewirausahaan suatu negara.

Kewirausahaan secara global memiliki peran penting dalam proses pembangunan ekonomi serta kegiatan sosial dalam suatu negara, kewirausahaan menciptakan kemakmuran, lapangan pekerjaan serta

pertumbuhan ekonomi, sehingga pembangunan yang cocok dalam sebuah proses ekonomi adalah adanya lingkungan bisnis dengan mempromosikan sisi kewirausahaan yang dalam hal ini proses promosi dilakukan dan merupakan tugas penting dari masing-masing pemerintah dalam suatu negara.

Salah satu faktor yang mendorong kewirausahaan adalah pengembangan manusia. Pembangunan manusia di daerah yang berbeda akan berdampak berbeda pada kewirausahaan. Beberapa penelitian telah menyimpulkan bahwa sebagian besar pengusaha dengan pertumbuhan tinggi cenderung terkonsentrasi di sekitar daerah perkotaan karena dekat dengan akses seperti pendidikan, perawatan kesehatan, iklim, hiburan (Audretsch & Lehmann, 2005; Doan, 2021).



BAB 5

JUMLAH UMKM

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan interaksi suatu wilayah atau negara pada berbagai kelompok variabel, antara lain sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi dan lain-lain. Indonesia sebagai negara dimana pembangunan nasional pada hakekatnya mempunyai satu tujuan, yaitu kemajuan kesejahteraan umum. Ada pengaruh positif pertumbuhan penduduk terhadap pembangunan ekonomi dimana kondisi dan kemajuan penduduk erat kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha ekonomi: di satu pihak penduduk dapat menjadi pelaku atau sumber daya, faktor produksi, pihak lain dapat menjadi sasaran atau konsumen dari produk yang dihasilkan.

Menurut Halim (2020) small and medium business (MSME, kondisi kependudukan, data dan informasi kependudukan akan sangat berguna dalam menghitung jumlah tenaga kerja yang akan diserap, serta beberapa keterampilan dan jenis teknologi yang diperlukan yang akan digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Di sisi lain, mengetahui struktur penduduk dan kondisi sosial ekonomi di suatu wilayah akan sangat berguna dalam menghitung berapa banyak orang yang dapat memanfaatkan peluang dan hasil pengembangan atau berapa pangsa pasar produk tertentu perusahaan.

Berdasarkan kemajuan zaman, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memegang peranan penting dalam meningkatkan pendapatan ekonomi daerah, termasuk dalam mensejahterakan masyarakat. Peranan

usaha mikro, kecil dan menengah sangat penting bagi suatu daerah, terutama sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi daerah. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu cara untuk mengenali produk kreatif lokal dan memberikan peluang bisnis bagi bisnis lokal. meningkatkan perekonomian suatu daerah, sehingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) harus dapat berperan serta dalam pembangunan perekonomian negara khususnya dalam pembangunan pertumbuhan ekonomi Indonesia (Putra, 2016) there are about 57.8 million actors of MSMEs in Indonesia. In 2017 and the next few years it is estimated that the number of MSME perpetrators will continue to grow. MSMEs have an important and strategic role in national economic development. In addition to its role in economic growth and employment, MSMEs also play a role in distributing development outcomes. So far, MSME has contributed 57,60% Gross Domestic Product (PDB).

Pada studi lain berkaitan dengan UMKM banyak negara berkembang dimana UMKM nya memainkan peranan penting dalam pembangunan. Mereka berkontribusi pada sebagian besar output, lapangan kerja, dan pertumbuhan. Misalnya, di Republik Korea, UMKM saat ini berjumlah sekitar 99% dari semua perusahaan, 88% lapangan kerja, dan hampir setengah dari total output dan ekspor. Dengan demikian, UMKM merupakan sumber pendapatan dan pekerjaan yang penting di Republik Korea, dan situasi ini serupa di banyak negara berkembang, khususnya di Asia (Lee, 2016).

Akibatnya, banyak pemerintah telah mengadopsi perangkat kebijakan untuk mempromosikan UMKM sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi mereka. Tinjauan literatur menunjukkan bahwa kebijakan yang ditargetkan untuk mendukung UMKM dibenarkan oleh dua argumen. Pertama, UMKM memberikan kontribusi khusus kepada negara-negara berkembang dalam hal pertumbuhan, lapangan kerja, produktivitas dan investasi, dan oleh karena itu layak mendapat dukungan khusus. Kedua, UMKM menghadapi tantangan atau bahaya tertentu yang tidak berlaku untuk perusahaan besar, sehingga mengatasi tantangan atau bahaya “meratakan lapangan permainan”, yang menghasilkan persaingan yang sehat, pertumbuhan, dan efisiensi, kemakmuran yang lebih besar.

UMKM memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi setiap negara, seperti: sebagai menghasilkan kesempatan kerja, pendapatan dan penciptaan kekayaan, dan pengurangan kemiskinan. Perusahaan-

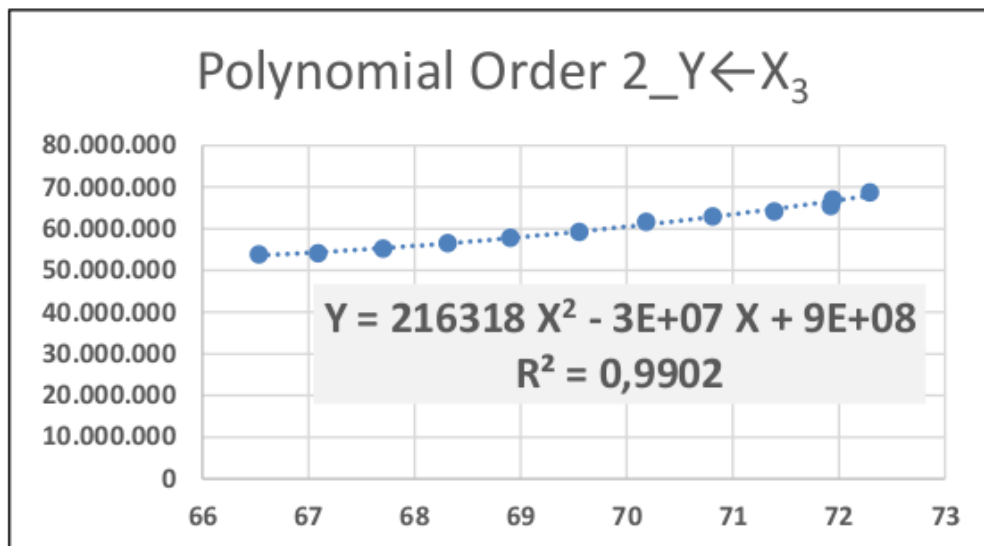
perusahaan ini sangat penting di negara yang kurang berkembang. Keberadaan UKM berkontribusi pada konsumsi barang-barang tetangga yang tidak efisien dan merangsang ekonomi di seluruh dunia. UKM merupakan bagian integral dari ekonomi berkembang melalui impor dan perubahan harga, yang diterjemahkan ke dalam keberhasilan ekonomi global. Dalam perekonomian global, mereka memainkan peran penting melalui kritik mereka terhadap komitmen terhadap PDB (produk dan produk domestik bruto) dan meningkatkan kenyamanan masyarakat. Ini juga memberikan lebih banyak pekerjaan kepada orang-orang di berbagai ekonomi daripada organisasi besar dan dengan demikian mengarah pada pengurangan kemiskinan (Lee, 2016).

UMKM telah menarik perhatian dan minat para pembuat kebijakan dan akademisi selama beberapa dekade. Namun, masih ada kekurangan penelitian yang menganalisis UMKM dan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Jelas ada kebutuhan untuk melihat keadaan sektor UMKM saat ini karena itu penting agar faktor-faktor pertumbuhan yang diperlukan diterapkan tepat waktu untuk mencegah hal terburuk terjadi di masa depan. Oleh karena itu, penilaian UMKM dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi serta kuantifikasi efek relatifnya akan memiliki implikasi penting bagi pengembangan manajemen dan pengelolaan UKM di masa depan. Selain itu, banyak penelitian menunjukkan hasil yang bertentangan tentang peran UKM dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, mereka menemukan hasil yang mengurangi nilai UKM sebagai obat mujarab untuk penciptaan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi (Manzoor et al., 2021).

Pada negara berkembang, perkembangan UMKM sangat dipengaruhi oleh intervensi pemerintah. Para peneliti menjelaskan tentang potensi UMKM untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi, tetapi bersikeras bahwa peran ini hanya akan dicapai jika pemerintah negara menyediakan mereka peralatan yang diperlukan untuk beroperasi di sektor ini dan memberi mereka dukungan yang memadai untuk pertumbuhan dan perkembangan. Di UMKM, ekonomi yang semakin mengglobal saat ini memasok industri untuk industri yang paling penting (Morina & Gashi, 2016).

Sedangkan pada grafik dibawah ini menjelaskan hubungan antara jumlah UMKM dengan *Human Development Index* menggunakan order 2 menggunakan Regresi Polynomial. Pemilihan order 2 didasarkan pada

pertimbangan hasil uji koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,9902 hasil ini lebih besar dibandingkan dengan nilai R^2 jika menggunakan polynomial order 2.



Grafik 5. Pengaruh Jumlah UMKM terhadap Human Development Index

Pada grafik di atas dijelaskan bahwa Kewirausahaan Global berpengaruh positif terhadap *Human Development Index* Indonesia dengan kontribusi sebesar 99,02%, hasil dari uji di atas sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Chowdhury, 2020). Kewirausahaan dan usaha kecil terutama dilihat sebagai fondasi bagi startup. Kewirausahaan dan UMKM adalah ilmu dan seni. Keduanya membutuhkan pemikiran, penalaran dan modal manusia. Seorang wirausaha adalah seorang inovator, sumber ide dan prosedur. Orang-orang di negara-negara dengan intensitas iman yang lebih besar daripada sains, filsafat, sastra, inovasi dan estetika (ilmu kecantikan). Sebuah produk atau jasa harus disertai dengan estetika (ilmu tentang proporsi dan keindahan). perusahaan menghadapi persaingan terus-menerus dan tantangan timbal balik secara umum dan khususnya dalam globalisasi yang memaksa pengusaha untuk mengejar penelitian dan pengembangan. Definisi seni yang paling populer adalah ide imajinatif atau keterampilan teknis dan kreasi, sastra, artefak, kreativitas, lukisan, patung, seni grafis dan kaligrafi. Kerajinan, lukisan, patung dan seni grafis adalah bagian dari sektor UMKM. Komposisi penting dalam bidang seni lukis dan puisi. Karya komposisi artistik harus memperhatikan warna, outline, ukuran, medium, melodi, ruang, tekstur, keseimbangan, kontras, aksen, harmoni, proporsi, kedekatan dan nilai. Sebuah karya seni harus memperhatikan bentuk, isi dan konteks. Seni merangsang pikiran,

emosi, keyakinan, atau gagasan individu melalui panca indera. Seorang pengusaha harus menggabungkan kualitas artistik dengan ketajaman bisnis.

Dijelaskan juga oleh (Chowdhury, 2020) bahwa seorang wirausahawan membuat produk dengan mempertimbangkan pendapatan dan daya beli pembeli. Di Bangladesh, UMKM memproduksi terutama untuk pasar lokal. Sebuah produk dapat menghadirkan variasi kualitas sesuai dengan proporsi bahan, seni dan inovasi. Karena kebanyakan orang memiliki pendapatan dan daya beli yang lebih rendah, produk dibuat dari bahan dengan harga yang lebih rendah. Kebanyakan orang mengkonsumsi dan menggunakan produk dan jasa di bawah standar dengan bahan dan spesifikasi.

Berdasarkan keterangan dari Kementerian Keuangan yang dirilis pada tanggal 27 September 2021 menyebutkan bahwa Usaha mikro, kecil dan menengah (UKM) yang berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) memainkan peran penting dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung UMKM agar tetap bertahan, berkembang dan berkembang di tengah tantangan pandemi dan transformasi melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (Kementrian Keuangan, 2021).

Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai program lain untuk mendukung UMKM, seperti subsidi bunga, penempatan dana masyarakat dengan bank umum mitra untuk mendukung ekspansi kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit untuk UMKM, penjaminan pinjaman modal kerja UMKM, Banpres untuk Usaha Mikro Produktif (BPUM), Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung (BTPKLW) dan insentif pajak final bagi UKM yang dibayarkan oleh pemerintah.

Menurut survei Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, sekitar 69,02% UMKM mengalami kesulitan permodalan selama pandemi Covid-19. Sementara itu, hingga 39,22% UMKM mengalami kekurangan modal selama pandemi Covid-19, menurut laporan pengaduan KemenkopUKM pada Oktober 2020. Data menunjukkan bahwa bantuan modal untuk UMKM penting. Oleh karena itu, pemerintah memberikan dukungan permodalan kepada UMKM melalui program restrukturisasi kredit. Hingga 31 Juli 2021, tercatat lebih dari 3,59 juta UMKM telah menggunakan program senilai Rp 285,17 triliun.



BAB 6

TENAGA KERJA UMKM

Diketahui bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah yang berada di Indonesia sejauh ini memiliki peran penting dalam pertumbuhan sosial dan ekonomi. Peran besar yang dimiliki oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah antara lain adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyumbang kurang lebih 5,7% pada tahun 2018. Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebesar 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku ekonomi di Indonesia secara global dunia usaha, sedangkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1% sisanya 38,9% dilakukan oleh perusahaan besar yang hanya mewakili 5.550 atau 0,01 dari jumlah pelaku korporasi. UKM didominasi oleh usaha mikro yaitu 98,68 dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%, sedangkan kontribusi usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8% (Sasongko, 2020).

Dari data di atas, Indonesia memiliki potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM khususnya usaha mikro sangat besar dan daya serap tenaga kerja tinggi, tenaga kerja sangat penting Pemerintah dan pelaku ekonomi harus mengangkat “kelas” usaha mikro dan menengah. Semangat kewirausahaan ini terbukti kuat bahkan dalam menghadapi krisis ekonomi: bahkan usaha mikro memiliki perputaran transaksi yang cepat, menggunakan produksi nasional dan bersentuhan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Pemerintah menyadari potensi UMKM, oleh karena itu, dalam

beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mengambil kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil untuk dipromosikan ke tingkat usaha menengah. Jika dilihat lebih jauh UMKM memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran sedang, karakter ini yang membuat UMKM memiliki keunikan dalam kondisinya, sehingga berdasarkan keunikannya ini UMKM dirasa harus diperhatikan secara seksama dalam pengembangannya. Ukurannya yang kecil membuat pangsa pasar UMKM juga berbeda dengan perusahaan sedang maupun besar lainnya sehingga focus yang mereka lakukan juga memungkinkan untuk melakukan produksi yang lebih efektif dan efisien.

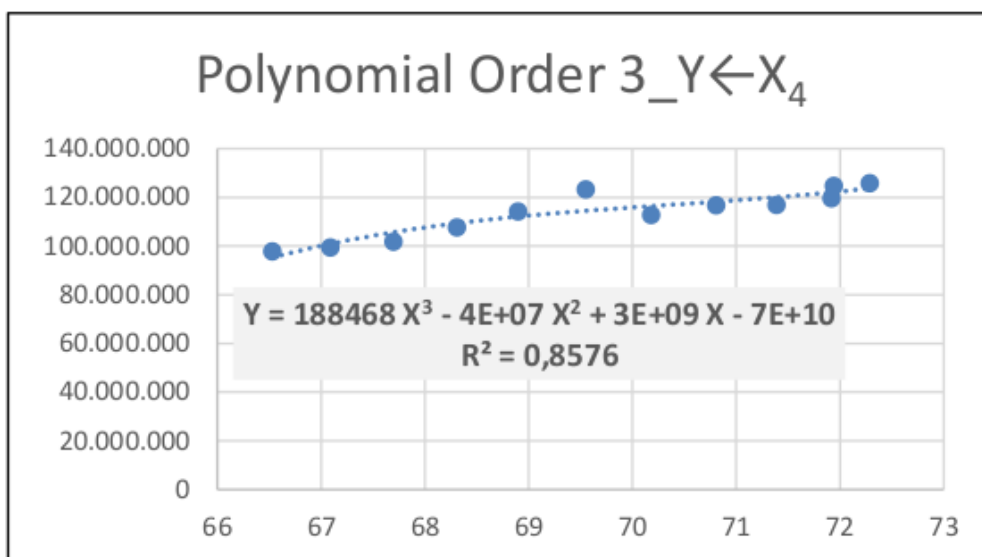
Tingkat produksi yang efektif, efisien dan fokus terhadap satu tujuan inilah yang membedakan antara UMKM dengan jenis produksi yang lebih besar, spesialisasi bisnis adalah ciri keunikan lain dari UMKM ini, UMKM mengkhususkan pada satu atau dua jenis produksi yang memungkinkan untuk berkonsentrasi mengembangkan ide bisnis yang dimiliki. Di Indonesia, sebagian besar UMKM beroperasi melalui jalur produksi dan pemasaran tradisional, namun para pemangku kepentingan UMKM juga dihadapkan pada berbagai tantangan seperti kurangnya pengetahuan, kurangnya sumber daya manusia dan Tenaga Kerja yang terampil, suasana yang kurang kondusif, kurangnya fasilitas, terbatasnya pasar dan akses informasi dan birokrasi. Keterbatasan UMKM, terutama dalam hal pengetahuan dan sumber daya, model inovasi terbuka akan menjadi metodologi yang tepat untuk pertumbuhan UMKM.

Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang mendukung pemerataan pembangunan ekonomi. Indonesia merupakan salah satu negara terpadat di dunia, yang membuat para ekonom mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dapat menjadi salah satu mesin pembangunan. Oleh karena itu, pertumbuhan penduduk dengan kualitas sumber daya yang baik dapat memberikan kontribusi lebih bagi perkembangan kegiatan ekonomi sehingga jumlah tenaga kerja yang terserap meningkat (Tambunan, 2011).

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar, namun jumlah tenaga kerja yang belum mendapatkan pekerjaan cukup tinggi, masalah yang tidak dapat diselesaikan karena kualitas sumber daya manusianya yang masih rendah dan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak seimbang dengan tenaga kerja yang tersedia. Menghadapi permasalahan tersebut, peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya

manusianya melalui pelatihan dan pendidikan sangat diperlukan. Pelatihan dan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kreativitas masyarakat pekerja agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan keterampilan yang baik akan menjadi modal utama untuk mendapatkan pekerjaan sedangkan orang yang tidak berdaya saing akan tersingkir dan akhirnya menganggur (Hamdani & Wirawan, 2012).

Pada gambar grafik dibawah ini dijelaskan berkaitan dengan hubungan antara Tenaga Kerja UMKM dengan *Human Development Index* menggunakan order 3 menggunakan Regresi Polynomial. Pemilihan order 2 didasarkan pada pertimbangan hasil uji koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,8576 hasil ini lebih besar dibandingkan dengan nilai R^2 jika menggunakan polynomial order 3.



Grafik 6. Pengaruh Tenaga Kerja UMKM terhadap Human Development Index

Pada hasil Regresi yang disajikan grafik di atas dijelaskan bahwa Tenaga Kerja UMKM berpengaruh secara positif pada order ketiga dengan R square sebesar 85%, yang artinya sebesar 85% Variabel Tenaga Kerja UMKM memiliki pengaruh terhadap *Human Development Index*. Sejalan dengan penelitian ini, penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Nurmainah (2013) penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus juga *Human Development Index* memiliki hubungan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Sehingga jika ditarik garis lurus terhadap Tenaga Kerja UMKM, Tenaga kerja terampil merupakan sumber daya manusia potensial yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan di era globalisasi. Dampak positif yang sama pada data produksi akan lebih besar lagi mengingat terus bertambahnya jumlah orang, sesuai dengan teori human capital yaitu bahwa pendidikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena pendidikan berperan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Sejak 1999 United Nations Development Programme (UNDP) memperkenalkan konsep pengukuran kualitas modal manusia yang disebut *Human Development Index* (HDI) kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi. Dimensi ini mencakup umur panjang dan kesehatan; pengetahuan dan kehidupan yang bermartabat. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup. Selain itu, indikator gabungan dari tingkat melek huruf dan rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengukur dimensi pengetahuan. Dan untuk mengukur ukuran kehidupan yang layak, kami menggunakan indikator paritas daya beli (Nurmainah, 2013).

Indonesia sebagai negara berkembang, pembangunan ekonomi merupakan faktor yang sangat penting dalam upaya memajukan negara. Pembangunan ekonomi dilakukan oleh Indonesia dalam upayameningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, memajukan sektor teknologi dan pendidikan, menyeimbangkan perekonomian, dan mendistribusikan pendapatan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan sebagai wujud keberhasilan pembangunan ekonominya, termasuk salah satunya melalui program pemberdayaan UMKM guna menyerap sumber daya manusia terampil.

Seperti yang diketahui bahwa, Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memegang peranan penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam memberikan hasil pembangunan. Juga terbukti bahwa UMKM tidak terpengaruh oleh krisis, pada periode 1997-1998, hanya UMKM yang mampu bertahan (Meryana, 2012).

Kemudian data BPS pasca krisis ekonomi 1997-1998, jumlah UMKM tidak berkurang, tetapi terus meningkat, mampu menyerap 85 juta menjadi 107 juta tenaga kerja hingga 2012. Pada tahun itu, jumlah tersebut

wirausahawan di Indonesia adalah 56.539.560. Dari jumlah tersebut, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebanyak 56.534.592 unit atau 99,99%, sisanya sekitar 0,01% atau 4.968 unit merupakan usaha besar. Data tersebut menunjukkan bahwa UMKM merupakan pasar yang sangat potensial bagi sektor jasa keuangan khususnya perbankan untuk menyalurkan pembiayaan, karena sekitar 60-70% UMKM belum memiliki akses pembiayaan perbankan (Y. R. Sari et al., 2016).

Berdasarkan tingginya penyerapan tenaga kerja terhadap UMKM saat ini, menimbulkan era baru, era persaingan antar perusahaan yang sangat ketat ini, tuntutan akan pekerjaan dengan ijazah dan keterampilan yang memadai di perkotaan menjadi kendala utama dalam memperoleh pekerjaan bagi para pencari kerja. Sektor informal, kota-kota besar di negara berkembang seperti Indonesia memiliki konsentrasi penduduk yang tinggi dan berkontribusi terhadap pertumbuhan angkatan kerja informal. Melanda Indonesia dan pengangguran merajalela dimana-mana, sehingga satu-satunya peluang yang dapat menyelamatkan kelangsungan hidup jutaan PHK dan pengangguran di desa adalah sektor informal. Peranan UMKM (usaha kecil dan menengah) dalam pertumbuhan ekonomi daerah dapat ditunjukkan dengan tumbuhnya UMKM itu sendiri. Maksudnya jika sektor UMKM tumbuh dan berkembang di suatu wilayah, maka akan berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja dan tentunya produksi (I. U. Sari & Saputra, 2020).



BAB 7

EKSPOR NON MIGAS UMKM

UMKM dalam hal ini memiliki peran yang penting dalam peningkatan perekonomian, hal ini terbukti melalui banyaknya penyerapan tenaga kerja yang tinggi serta memiliki kontribusi besar terhadap Pendapatan Nasional Indonesia. UMKM sendiri sejauh ini memiliki daya tahan yang terbilang kuat bila dibandingkan dengan sector lainnya sebagai factor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Fauziah, 2021).

UMKM dikategorikan sebagai sector yang kuat adalah pada saat menghadapi krisis yang disebabkan oleh Covid-19 yang memberikan tekanan luar biasa terhadap perekonomian dunia. Dengan peran strategis tersebut, tentunya UMKM berperan penting dalam mendukung bauran kebijakan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan, serta upaya nasional untuk mendukung transformasi ekonomi menuju Indonesia yang maju. Berbagai upaya terus dilakukan untuk memperkuat UMKM dari awal hingga akhir, termasuk oleh Bank Indonesia. Pasca pandemi Covid-19, transformasi UKM harus diperkuat dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital agar dapat mengambil manfaat dari salah satu pelajaran utama krisis kesehatan, yaitu pemanfaatan teknologi digital untuk aktivitas sehari-hari (Revindo et al., 2019; Tambunan, 2011).

Dalam hal ini UMKM diperkuat dengan adanya aspek kelembagaan didalamnya demi mendorong adanya integrasi ekonomi yang beskala besar. Peningkatan skala ini difokuskan pada tingkat produksi serta inovasi usaha,

fungsi dari peningkatan antara lain adalah sebagai dorongan perbaikan daya saing UMKM sehingga tercipta juga penguatan pasar, kualitas produk dan juga manajemen usaha dan tidak lupa kapasitas digitalisasi teknologi.

Proses penumbuhan digitalisasi yang dilakukan oleh UMKM sejauh ini memberikan peluang untuk bangkit dan bertransformasi untuk bertumbuh jauh lebih tinggi yang diikuti dengan kapasitas produksi serta penambahan modal. Pada saat pandemi Covid-19 melanda hingga saat ini, percepatan penggunaan digital dalam memenuhi kebutuhan konsumsi, kegiatan produksi dan investasi telah dilaksanakan (Ali Shah et al., 2011).

Pemanfaatan teknologi yang saat ini telah diaplikasikan pada kegiatan UMKM baik produksi, investasi dan konsumsi terbukti mampu mengembangkan serta mendukung perekonomian menjadi jauh lebih baik dalam jangka waktu menengah. Untuk memastikan pencapaian tujuan tersebut, prioritas penguatan UMKM bertujuan untuk mendukung potensi ekspor dan pengembangan pariwisata, serta memperkuat pasokan dan distribusi produk pangan strategis di tingkat nasional dan daerah.

UMKM merupakan unit usaha yang relatif kecil, namun memiliki keunggulan sebagai unit usaha yang sangat tangguh dan fleksibel dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Eksposur minimum terhadap risiko di pasar keuangan. UMKM juga menunjukkan fleksibilitas dalam model bisnisnya, seperti adopsi teknologi digital yang tercermin dari tren digitalisasi UMKM, dan menyerap banyak tenaga kerja informal tambahan yang terkena dampak dari krisis ekonomi pada saat Covid-19.

Berkaitan dengan hal tersebut bahwa UMKM merupakan unit usaha yang Tangguh dalam menghadapi krisis serta unit usaha dengan transformasi digital yang cepat dalam prakteknya nyatanya dalam proses pembangunan ekonomi UMKM juga memiliki peran, Pembangunan ekonomi 5 (lima) tahun ke depan bertujuan untuk membangun ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, yang dibuktikan dengan kemampuan mengelola sumber daya ekonomi, dan menggunakan sumber daya tersebut untuk menghasilkan barang dan jasa yang bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar internal. hasilnya harus mendorong pertumbuhan yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan secara adil dan merata.

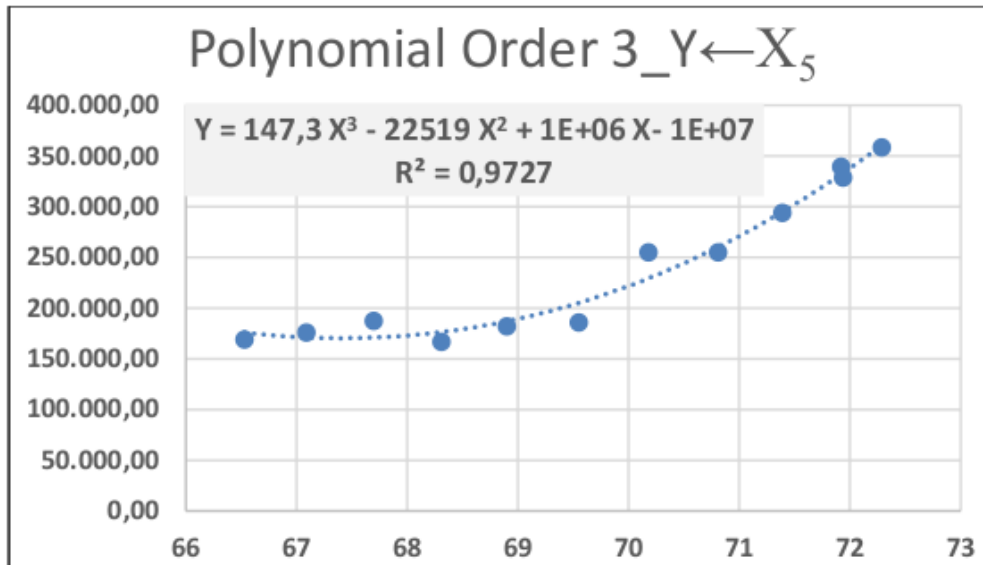
Dalam agenda pembangunan ini, salah satu tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan dan yang akan menjadi prioritas Kementerian Koperasi dan UKM adalah peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, ekspor dan daya saing ekonomi yaitu dengan penguatan kewirausahaan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (KemenkopUKM, 2020).

Jika ditarik garis lurus dengan agenda pembangunan ekonomi yang melibatkan UMKM dalam hal ini, peluang pengembangan UMKM yang memasuki pasar ekspor masih memiliki prospek yang baik dan potensi yang cukup besar di masa mendatang. Ekspor dilakukan dari satu negara ke negara lain jika negara tersebut membutuhkan produk tertentu dan tidak mampu memenuhi permintaan produk tersebut.

Kegiatan Ekspor memiliki beberapa keuntungan, terlebih lagi saat ini dan beberapa lembaga yang mendukung prospek agar UMKM bisa naik kelas atau lebih kompetitif dengan negara lain misalnya Bank Indonesia dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Bank Indonesia mendukung UMKM dengan memberikan pelatihan, seminar dan pinjaman kepada pelaku UMKM. Dengan membantu kemajuan UMKM melalui kelas, LPEI memberikan bantuan terhadap hambatan ekspor dan pembiayaan ekspor.

Peningkatan jumlah ekspor karena peningkatan jumlah produksi barang dalam negeri akan menghasilkan kesempatan kerja penuh, pendapatan per kapita suatu negara akan meningkat, yang berarti bahwa daya beli juga meningkat. Tingginya tingkat ekspor produk akan menyebabkan tambahan unit usaha atau bahkan industri baru untuk menghasilkan lebih banyak produk. Karena seiring berjalannya waktu, produksi ekspor juga akan meningkat, sehingga untuk menghasilkan barang dan jasa serta memasarkannya diperlukan tenaga kerja, sehingga lapangan pekerjaan akan tercipta, maka akan meningkat agar mampu menyerap tenaga kerja (Bu'ulolo et al., 2020).

Dijelaskan lebih lanjut pada grafik dibawah ini, hubungan antara Ekspor non Migas UMKM dengan *Human Development Index* menggunakan order 3 menggunakan Regresi Polynomial Pemilihan order 3 didasarkan pada pertimbangan hasil uji koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,9727 hasil ini lebih besar dibandingkan dengan nilai R^2 jika menggunakan polynomial order 2.



Grafik 7. Pengaruh Ekspor Non Migas UMKM terhadap Human Development Index

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Majidli (2020) peran aktif UMKM di sektor ekspor tidak hanya berdampak positif pada laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memungkinkan mereka untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas, mengadopsi teknologi produksi baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan persaingan di pasar internal. Dalam konteks ini, sebagian besar negara menerapkan berbagai kebijakan subsidi dan insentif. Namun, kebijakan tersebut tidak serta merta menghilangkan masalah ekspor bagi UMKM. Salah satu alasan utama kegagalan kebijakan ini adalah untuk memasukkan praktik yang diterima secara umum. Dengan latar belakang ini, artikel ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi oleh UMKM yang beroperasi di berbagai negara dengan menggunakan data sekunder dan mengelompokkan masalah ini ke dalam dua kategori besar.

Saat ini, UMKM memiliki salah satu elemen terpenting dari pembangunan ekonomi dan sosial, memegang bagian terbesar dari perusahaan di dunia. Dari sudut pandang ini, kondisi pertama pembangunan ekonomi adalah mendorong pengembangan UMKM yang mengarah pada kewirausahaan. Secara khusus, peran aktif UMKM dalam perdagangan internasional akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dengan memberikan aliran masuk devisa ke dalam negeri dan meningkatkan persaingan internal dengan menciptakan lapangan kerja baru.

Pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Pinudom (2019) bahwa UMKM memiliki hubungan yang positif sesuai dengan penelitian yang dilakukan saat ini, bahwa UMKM memiliki peran dan kontribusi terhadap Pendapatan Nasional. Dalam hubungan ini peran pemerintah sangat diperlukan karena Pemerintah dapat menciptakan lingkungan untuk mendukung pendidikanperbaikan, inovasi, dan pelatihan kepada UKM. Apalagi dukungan keuangan dari pemerintah atau keuanganinstitusi menjadi prioritas.



BAB 8

INVESTASI UMKM

Eksistensi UMKM saat ini memang tidak dapat diragukan lagi terutama atas prestasinya yang mampu melewati krisis Covid-19 yang dialami oleh 178 Negara di Dunia tidak terkecuali Indonesia. UMKM saat ini menjadi salah satu roda penggerak perekonomian Indonesia. Pemberdayaan UKM di tengah globalisasi dan persaingan yang kuat berarti UKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti peningkatan inovasi produk dan layanan, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi serta perluasan bidang komersialisasi. Sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UMKM merupakan sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia (Sudaryanto et al., 2013).

Pada saat ini perekonomian Indonesia berkonsentrasi terhadap terobosan serta kebijakan yang berkaitan dengan program ekonomi yang dinamis guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta dapat meratakan distribusi pendapatan sebagaimana tujuan utama dari pembangunan ekonomi. Selama kurang lebih 20 tahun, pembangunan ekonomi telah mengubah status Indonesia dari negara terbelakang menjadi negara berkembang. Vietnam dan lain-lain. Rata-rata perekonomian Indonesia tumbuh moderat (sekitar 5,6% per tahun), disertai beban berbagai masalah seperti ketimpangan pendapatan yang tinggi, daya saing yang rendah dan lain-lain yang dapat mendorongnya ke dalam perangkap pendapatan menengah.

Ujung tombak pembangunan Ekonomi bila ditarik garis lurus kebelakang sejauh ini masih dimiliki salah satunya oleh UMKM, sejauh ini banyak peran UMKM yang menjadi factor dalam pertumbuhan ekonomi salah satu peran dan fungsi utama adalah UMKM mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar serta dapat mendistribusikan pembangunan ekonomi secara merata. Selain hal tersebut kegiatan perekonomian yang ditimbulkan oleh UMKM adalah berkaitan dengan inovasi serta nilai investasinya besar (Prabawati & Qurnia, 2021).

Kapasitas kinerja pembangunan ekonomi Indonesia masih jauh dari tercapai Salah satu masalah/hambatan utama adalah lemahnya artikulasi antara kebijakan pembangunan dan pelaksanaannya karena yang harus diprioritaskan, khususnya pembangunan sebagian besar pelaku ekonomi di sektor-sektor ekonomi. Sebagai contoh, lebih dari 30 tahun setelah rezim Orde Baru, arah kebijakan pembangunan lebih terfokus pada upaya mendorong perkembangan konglomerat (perusahaan besar) (Pontoh & Budiarmo, 2020).

UMKM sejauh ini dapat dikatakan memiliki banyak fungsi dan peran yang strategis seperti yang dijelaskan diatas, namun dengan peran yang dimilikinya UMKM tidak lepas dari berbagai kendala seperti Modal, Kemampuan Manajemen Usaha dan juga Kualitas Sumber daya Manusia serta pengelolannya. Permasalahan ini dipicu karena kurangnya akses informasi seperti contohnya berkaitan dengan informasi modal sehingga berakibat pada terbatasnya UMKM untuk berkembang.

Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan kendala yang dialami oleh UMKM, sektor ini juga menghadapi tantangan terkait dinamika lingkungan bisnis eksternal. Dua aspek lingkungan meliputi: pertama, lingkungan eksternal langsung seperti kondisi persaingan, perilaku konsumen terhadap produk perusahaan, kesehatan pemasok, dan dukungan lembaga keuangan yang relatif tidak terkendali bagi perusahaan. Masalah kepastian hukum, kondisi makro ekonomi, situasi politik dan keamanan, serta masalah sosial budaya di lingkungan bisnis menjadi tantangan (Suprpto, 2007).

Kedua aspek lingkungan diperhitungkan oleh perusahaan ketika berinvestasi di suatu wilayah. Karena faktor internal, masalah produksi dan pemasaran perusahaan, serta permodalan sering juga dikecam oleh kategori UMKM, kualitatif dan kuantitatif, sangat terbatas karena penguasaan teknologi yang relatif rendah. Perbankan juga cenderung

berhati-hati dalam menyalurkan kredit kepada UMKM, dimana UMKM seringkali menghimpun modal dari lembaga keuangan non-perbankan yang seringkali dikenakan bunga atas biaya produksi (Suprpto, 2007).

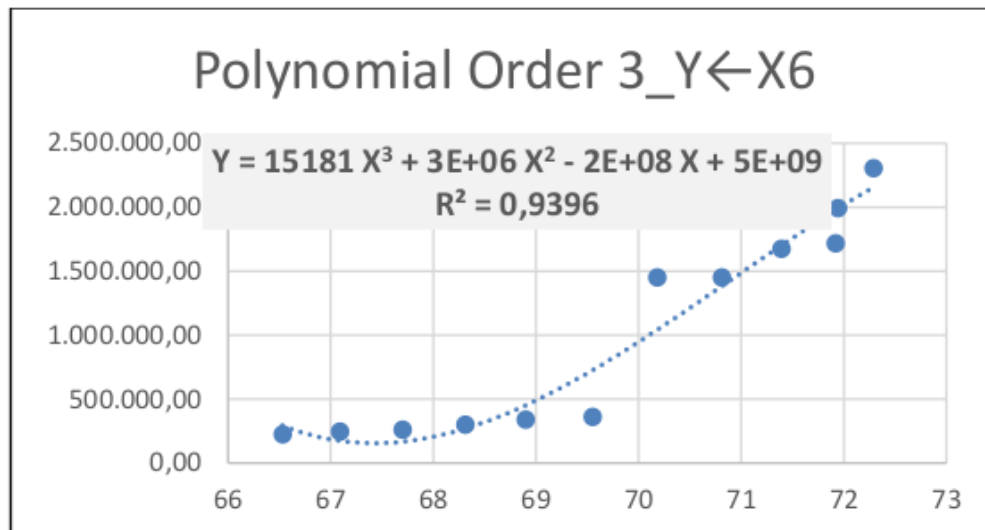
Mengingat pentingnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian negara, terutama dari sisi PDB dan penyerapan tenaga kerja, maka sangat penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong kinerja dan ekspor UMKM sebagai salah satu penyebab ketahanan UMKM terhadap krisis ekonomi.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan pada 2021, UMKM adalah penyumbang PDB Nasional Indonesia sebagai salah satu unit pemulih perekonomian Indonesia dan terus bertumbuh ditengah tantangan pandemic dan transformasi pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Menurut survei Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, sekitar 69,02% UMKM mengalami kesulitan permodalan selama pandemi Covid19. Sementara itu, sebanyak 39,22% UMKM mengalami kesulitan permodalan selama pandemi covid19, menurut laporan pengaduan ke KemenkopUKM pada Oktober 2020.

Data menunjukkan bahwa dukungan permodalan bagi UMKM itu penting. Oleh karena itu, pemerintah memberikan dukungan permodalan kepada UMKM melalui program restrukturisasi kredit. Program ini senilai Rp 285,17 triliun yang dimanfaatkan untuk mengembangkan dan memperkuat UMKM di Indonesia yaitu sebanyak 3,59 juta menurut datapada 31 Juli 2021 berdasar keterangan yang diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kementrian Keuangan, 2021).

Dalam meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan setiap negara yang ada didunia, investasi merupakan Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menentukan factor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, investasi pada hakekatnya merupakan langkah awal dalam kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika investasi mempengaruhi naik turunnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan tingginya dan lambatnya pembangunan. Pertanyaan investasi sering mendapat banyak jawaban dari para ahli teori dan profesional pembangunan. Pandangan tentang pentingnya investasi untuk mendukung pembangunan negara berkembang dimulai dengan ditemukannya model pertumbuhan pasca perang pada 1950-an dan 1960-an oleh berbagai pakar pembangunan seperti Rostow dan Harrod Domar.

Investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana peningkatan investasi akan meningkatkan nilai tambah atau pendapatan dimasa yang akan datang karena nilai tambah suatu investasi akan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Seperti yang disajikan pada grafik berikut, dengan regresi Polynomial order 3 dan variabel Investasi sebagai X didapatkan nilai $R^2 = 0.939 >$ nilai R^2 menggunakan polynomial order 2.



Grafik 8. Pengaruh Investasi UMKM terhadap Human Development Index

Hasil penelitian diatas sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu (Prabawati & Qurnia, 2021) bahwa pengeluaran investasi dapat berdampak dalam hal menciptakan lapangan kerja baru. Dengan investasi, mereka akan menghasilkan pendapatan, yang akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan. Karena dengan berakhirnya hubungan kerja yang menyimpannya, ia mendapat penghasilan untuk menghidupi dirinya sendiri. Berdasarkan analisis regresi berganda menghasilkan pengaruh yang signifikan, simultan dan signifikan antara investasi, tenaga kerja dan kesejahteraan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pernyataan yang dikemukakan oleh peneliti sebelumnya didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto (2012) bahwa sektor UMKM dalam hal ini memiliki prospek yang menjanjikan jika dibandingkan sektor lain untuk mendukung nilai investasi sebagai factor penentu pertumbuhan ekonomi. Upaya pemerintah memberikan pinjaman mikro untuk pengembangan UKM dengan tujuan mengentaskan kemiskinan merupakan upaya yang baik. Sebagai sektor tenaga kerja

utama, kemajuan UKM akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan, sehingga jumlah penduduk miskin semakin berkurang. Selain itu Dengan investasi produktif, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Penelitian lain menyebutkan bahwa UMKM memiliki kemampuan untuk mengendalikan iklim investasi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, contoh dalam penelitian ini adalah Laos. Laos memiliki banyak UMKM yang kurang kompetitif namun kemudian para investor asing melihat celah demikian sehingga banyak peluang investasi yang terbuka sekaligus juga muncul tantangan baru bagi UMKM, sehingga hal ini membuktikan bahwa UMKM merupakan pembuka peluang investasi yang menjanjikan meskipun beberapa permasalahan seperti kurangnya promosi dan inovasi serta pasar terbatas tetap saja investasi terbuka (Kyophilavong, 2008) SMEs in Laos are small and lack competitiveness. The inflow of foreign direct investment (FDI).

BAB 9

LEARNING BY DOING KEWIRAUSAHAAN

Sebelum mengkaji tentang *learning by doing* yang diimplementasikan pada matakuliah kewirausahaan di perguruan tinggi, ada baiknya jika kita mengkaji terlebih dahulu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dijelaskan dalam pasal 3 bahwa tujuan pendidikan nasional yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian pasal 26 ayat 2 dikemukakan bahwa pengembangan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Pada bagian akhir pernyataan di atas mengungkapkan bahwa pemerintah tidak saja berorientasi pada penguasaan pengetahuan peserta didik, tetapi juga aspek lainnya yang menjadi bekal peserta didik ketika berada di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Pengetahuan saja tidaklah cukup dalam membekali peserta didik di dunia kerja, tetapi juga harus diimbangi dengan keterampilan serta kepribadian profesional, sebagaimana definisi pendidikan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pada bagian proses pembelajaran inilah pentingnya kurikulum dan metode pembelajaran yang efektif untuk menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang terintegrasi sebagaimana pada gambar di bawah ini.



Gambar 4. Pengembangan Kurikulum 2013

Sedangkan metode pembelajaran efektif yang digunakan untuk memberikan pemahaman secara maksimal terhadap peserta didik dalam studi ini yaitu metode *learning by doing*. Menurut Robani et al., (2021) pembelajaran *learning by doing* ini diterapkan dengan mengikutsertakan seluruh panca indera dalam proses belajar mengajar sehingga peserta didik dapat berperan dan berpartisipasi aktif karena didukung dengan pengalaman praktik selama proses pembelajaran berlangsung.

Dalam arti harfiah, *learning by doing* berasal dari dua kata yaitu *learning* atau belajar dan *doing* atau bekerja atau melakukan atau pengalaman. *Learning* pada umumnya terselenggara di sekolah atau kampus yang memerlukan waktu, mencurahkan pikiran dan tenaga serta mengharapkan hasil yang dibina oleh guru dan atau dosen. Sedangkan *doing* terselenggara pada dunia usaha yang sama dengan *learning* yaitu mencurahkan pikiran dan tenaga serta mengharapkan hasil yang dibina oleh manajer, supervisor dan seterusnya.



Sejak dikenalkan pertama kali oleh filsuf Amerika Serikat John Dewey, *learning by doing* merupakan pendekatan pembelajaran yang memposisikan pengalaman sebagai proses belajar yang sangat berharga, dan *learning by doing* ini sama dengan *experiential learning* (Bradberry & De Maio, 2019; George et al., 2015; Lorentz et al., 1993; Ord, 2012; Sharlanova, 2004; Walter et

al., 1981). Menurut Ord (2012) bahwa *learning by doing* (atau *experiential learning*) didasarkan pada tiga asumsi, dan asumsi-asumsi dibawah ini dapat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran yaitu:

1. Pembelajar paling baik ketika mereka secara pribadi terlibat dalam pengalaman belajar.
2. Pengertian terlibat disini yaitu keterlibatan atau partisipasi langsung peserta didik dalam proses belajar mengajar;
3. Pengetahuan harus ditemukan oleh individu jika ingin memiliki arti penting bagi mereka atau membuat perbedaan dalam perilaku mereka.
4. Peserta didik aktif dalam proses belajar mengajar; dan
5. Komitmen seseorang untuk belajar tertinggi ketika mereka bebas untuk menetapkan tujuan belajar mereka sendiri dan mampu secara aktif menajarnya dalam kerangka kerja tertentu.

Berdasar tiga asumsi di atas bahwa dalam *learning by doing* mensyaratkan peserta didik untuk berpartisipasi aktif secara langsung baik pada aspek pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik) maupun sikap (afektif). Partisipasi aktif ini kemudian diperluas oleh Rusman (2018) dengan pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa (PBAS) atau peserta didik. Pada PBAS ini peserta didik terlibat langsung dalam perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran.

Pertama, perencanaan pembelajaran. Bentuk keterlibatan peserta didik dalam aspek ini yaitu:

1. Perumusan tujuan pembelajaran. Idealnya dalam menetapkan tujuan pembelajaran seorang tenaga pendidik melibatkan peserta didik. Hal ini dilakukan karena konten pembelajaran berisi kemampuan atau kompetensi dan pengalaman-pengalaman peserta didik yang akan dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan tugas-tugas perkembangan peserta didik;

2. Penyusunan rancangan pembelajaran. Pada penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) seorang tenaga pendidik harus melibatkan peserta didik, hal ini dilakukan agar RPP yang disusun dapat diterima dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Apabila RPP telah dirancang oleh tenaga pendidik, maka sebaiknya tenaga pendidik menyampaikannya kepada peserta didik untuk dibahas, dikomentari, dikurangi atau ditambahkan tentang ruang lingkungannya. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada pertemuan pertama;
3. Memilih dan menentukan sumber belajar. Dalam memilih dan menetapkan sumber belajar, tenaga pendidik harus melibatkan peserta didik yaitu dengan cara melibatkan peserta didik untuk mencari dan menemukan bahan dan sumber yang dibutuhkan melalui penugasan dan pembuatan makalah dalam kegiatan pembelajaran. Dalam era teknologi informasi sekarang ini sumber dan bahan pembelajaran sangat tidak terbatas yang ada pada dunia maya atau internet. Jadi bukan saatnya lagi peserta didik mendominasi di kelas karena peserta didik dengan mudah dan cepat dapat menemukan sumber belajar secara *up-to-date*;
4. Menentukan dan mengadakan media pembelajaran yang akan digunakan. Siswa memiliki *interest* yang sangat berbeda-beda, yaitu ada yang auditif (senang mendengarkan), visual (senang melihat) dan kinestetik (sedang melakukan), untuk itu agar menyentuh semua *interest* tersebut tenaga pendidik harus menggunakan multimedia yang melibatkan peserta didik. Sudah saatnya sekarang ini peserta didik diberi kesempatan yang luas untuk mengeksplorasi dan mengelaborasi kemampuannya sendiri melalui penggunaan media pembelajaran yang mereka sukai.

Kedua, keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran, meliputi:

1. Kegiatan fisik, mental dan intelektual. Tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran yaitu pencapaian kompetensi yang meliputi kompetensi akademik, sosial dan vokasional, atau kalau meminjam istilah Bloom yaitu ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Artinya dalam proses pembelajaran tenaga pendidik harus melibatkan peserta didik seperti praktik, peragaan, bermain peran, pemecahan masalah yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas;

2. Kegiatan eksperimental. Dalam kegiatan eksperimen seorang tenaga pendidik harus banyak melibatkan peserta didik baik melalui kegiatan observasi, melakukan langsung di laboratorium atau lapangan sampai pada pembuatan laporan untuk dipresentasikan, tenaga pendidik harus memberikan waktu yang sebanyak mungkin kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya dalam kegiatan eksperimen tersebut;
3. Keinginan peserta didik untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif. Pada dasarnya peserta didik ingin dalam proses pembelajaran terjadi suasana yang menyenangkan dan bermakna, untuk itu tenaga pendidik harus kreatif dan inovatif dalam mengelola proses pembelajaran dengan melibatkan peserta didik seoptimal mungkin;
4. Keterlibatan peserta didik untuk mencari dan memanfaatkan sumber belajar yang ada. Sumber belajar saat ini sangat tidak terbatas apalagi dengan adanya komputer, internet, dan media cetak, sehingga tenaga pendidik harus mampu memanfaatkan peluang yang baik ini. Para peserta didik memiliki tingkat pemahaman yang mumpuni terhadap akses tersebut, tinggal bagaimana tenaga pendidiknya untuk mengelola kemampuan peserta didik tersebut untuk mengelola dan memanfaatkan sumber belajar yang ada;
5. Adanya interaksi multiarah, yaitu interaksi peserta didik dengan peserta didik, dan interaksi peserta didik dengan tenaga pendidik. Tenaga pendidik harus mampu menciptakan interaksi yang transaksional, yaitu melibatkan peserta didik dalam menyampaikan pendapatnya dalam kegiatan pembelajaran seperti: bertanya, menjawab, menyanggah, menambahkan, mengomentari, mengulas, menyimpulkan dan sebagainya. Tugas tenaga pendidik yaitu mengatur interaksi multiarah tersebut sehingga dapat terarah dan bermakna dalam kegiatan proses pembelajaran.

Ketiga, keterlibatan peserta didik dalam proses evaluasi pembelajaran, dapat meliputi:

1. Mengevaluasi sendiri hasil pembelajaran yang telah dilakukan;
2. Melaksanakan kegiatan semacam tes dan tugas-tugas yang harus dikerjakannya baik secara terstruktur maupun tugas mandiri yang diberikan tenaga pendidik, dan
3. Menyusul laporan hasil belajar baik secara tertulis maupun lisan.

Berangkat dari meikiran umum di atas, maka rumusan *learning by doing* dapat didefinisikan sebagaimana yang dikemukakan oleh Ka Yuk Chan et al., (2012) educational psychologists and researchers have posited many theories to explain how individuals learn, i.e. how they acquire, organize and deploy knowledge and skills. The 20th century can be considered the century of psychology on learning and related fields of interest (such as motivation, cognition, metacognition etc. yaitu proses di mana peserta didik memahami pengalaman mereka, terutama pengalaman dimana mereka secara aktif terlibat dalam membuat sesuatu dalam menjelajahi dunia. *Learning by doing* merupakan sebutan konseptual yang diterapkan pada berbagai situasi pembelajaran dan pendekatan pedagogis di mana tenaga pendidik berusaha melibatkan peserta didik dalam model pembelajaran yang lebih praktis dan kreatif.

Surahman & Fauziati (2021) mendefinisikan bahwa *learning by doing* merupakan model pembelajaran pragmatis dimana Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan manusia sebagai makhluk yang aktif. Disamping aktif, dan sebagai peserta didik partisipasi dalam proses belajar mengajar menjadi kunci keberhasilan diterapkannya *learning by doing*. Secara empiris model pembelajaran *learning by doing* ini dapat membantu peserta didik untuk memahami proses pembelajaran secara aktif hingga pada akhirnya dapat meningkatkan hasil pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Cukup banyak studi terdahulu yang mengkaji tentang konsep *learning by doing* yang diaplikasikan pada dunia pendidikan tinggi atau universitas (Sophan & Kurniawati, 2018). Metode *learning by doing* ini juga dipraktikkan oleh Bagheri & Pihie (2010) pada matakuliah kewirausahaan di perguruan tinggi negeri maupun swasta di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan metode *learning by doing* mampu menarik minat mahasiswa, tidak saja mahasiswa ekonomi dan bisnis tetapi juga selain itu misalnya ilmu komputer, multimedia, teknik arsitektur dan teknik telekomunikasi, yang didominasi oleh laki-laki. Mereka tertarik dengan metode ini karena metode pembelajarannya berdasarkan pengalaman sehingga mahasiswa benar-benar memperoleh pengalaman. Mahasiswa juga memiliki perusahaan kecil yang dibangun atas fasilitasi dari universitas.

Politis & Gabrielsson (2005) dalam penelitiannya pada sejumlah 291 pengusaha di Swedia mengungkapkan bahwa ketertarikannya pada dunia usaha disebabkan oleh model pembelajaran yang diadopsi oleh lembaga pendidikan dimana pengusaha tersebut dahulu menempuh studi. Jadi keberpihakan lembaga pendidikan melalui model pembelajaran yang digunakan mampu memberikan nilai tambah bagi alumni dalam jangka panjang, karena pengetahuan kewirausahaan yang mereka peroleh dari pendidikan kemudian dipraktikkan sehingga menjadi pengusaha yang diperhitungkan di Swedia pada tahun 2004.

Di Uni Eropa, pendidikan kewirausahaan masuk dalam kurikulum lembaga pendidikan bahkan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Erasmus+ (2017) menjelaskan bahwa pembelajaran kewirausahaan hanya dapat dilakukan melalui pengalaman, dan *learning by doing* merupakan cara yang paling efektif untuk mengembangkan pendidikan kewirausahaan pada lembaga pendidikan sekolah, lembaga pendidikan kejuruan dan universitas. Bahkan kontribusi lembaga pendidikan ini berdampak positif terhadap potensi kewirausahaan dan perkembangan ekonomi negara-negara yang tergabung di Uni Eropa.

Sejalan dengan Bagheri & Pihie (2010); Erasmus+ (2017) bahwa untuk meningkatkan pengetahuan kewirausahaan dan dalam waktu yang bersamaan peserta didik memiliki keterampilan kewirausahaan maka diperlukan metode pembelajaran yang efektif terutama jika diterapkan di perguruan tinggi. Metode efektif yang dimaksud menurut Moylan et al., (2016) yaitu *Experiential Learning* atau menurut Chang et al., (2014) disebut dengan metode *learning-by-doing* yang pada beberapa tahun terakhir banyak digunakan pada institusi pendidikan tinggi di Inggris dan Amerika Utara. Metode ini sangat efektif diterapkan pada matakuliah kewirausahaan di perguruan tinggi.

Bagaimana dengan *learning by doing* di Indonesia? apakah metode ini relevan digunakan di perguruan tinggi terutama pada matakuliah kewirausahaan? Untuk menjawab pertanyaan ini ada baiknya jika berangkat dari penjelasan Ciputra (2009) bahwa untuk membentuk seorang entrepreneur yang mengubah kotoran dan rongsokan menjadi emas terdapat 3-L yaitu: lahir, lingkungan dan latihan.

Aspek lahir berarti seorang entrepreneur datang dari keluarga entrepreneur memiliki keuntungan besar karena akan menginternalisasi nilai-nilai entrepreneurship sejak lahir. Entrepreneur mempunyai

atmosfer *entrepreneurship* dalam jangka waktu panjang. Tidak heran bila *entrepreneur* tidak asing dengan dunia *entrepreneur* dan karena itu lebih mudah menjadi *entrepreneur*. Berikutnya aspek lingkungan, terjadi pada saat *entrepreneur* berada pada lingkungan sosial atau pertemanan yang sangat kondusif terhadap *entrepreneurship*. Nilai-nilai dan kebiasaan para *entrepreneur* tentunya akan masuk dan terserap melalui pergaulan sehari-hari. Pada aspek yang ketiga yaitu latihan, mempunyai pengertian yang sama dengan pendidikan. Artinya menjadi seorang wirausaha itu tidak sekedar dari lahir dan lingkungan, tetapi untuk menjadi seorang wirausahawan itu bisa dilatih dan bisa dipelajari di sekolah atau perguruan tinggi.

Sedangkan implementasinya pada perguruan tinggi di Indonesia sebagaimana penelitian berikut ini. Menurut Setiawan & Lestari (2021) bahwa efek pengganda kewirausahaan yaitu terbukanya kesempatan kerja baru dan terdistribusikannya pendapatan secara nasional. Meskipun perguruan tinggi sangat berkontribusi dalam membangun minat berwirausaha masyarakat, namun demikian sebagian besar lulusan perguruan tinggi terutama pada empat perguruan tinggi swasta di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten masih ragu untuk menjadi pengusaha. Meskipun demikian peran perguruan tinggi untuk menginternalisasi pendidikan kewirausahaan dalam kurikulum pendidikannya masih sangat dibutuhkan. Karena secara empiris pendidikan kewirausahaan dapat membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha sehingga mahasiswa mampu mengenali peluang-peluang bisnis yang perlu ditindaklanjuti.

Studi Gunawan et al., (2019) bahwa pengangguran di Indonesia dapat dikurangi dengan hadirnya wirausaha-wirausaha baru. Sebagai salah satu bentuk tanggungjawab sosial perguruan tinggi kepada masyarakat, Universitas Sam Ratulangi hadir dengan menawarkan kurikulum kewirausahaan berbasis *experiential learning*, karena dipandang sangat efektif dalam proses pembelajaran.

Namun demikian menurut temuan Hidayat et al., (2018) bahwa kompetensi kewirausahaan lulusan perguruan tinggi masih sangat lemah, yang tidak saja disebabkan oleh faktor dosen, fasilitas pendukung, dan komitmen stakeholder kampus, tetapi juga karena proses dan model pembelajaran kewirausahaan yang digunakannya. Model pembelajaran yang tidak saja berorientasi pada penguasaan materi, namun juga penguasaan terhadap pengalaman dalam bekerja sesuai dengan bakat dan

minat yang saat ini dibutuhkan oleh bangsa ini yang secara teoretik disebut dengan model pembelajaran *learning by doing*.

Metode pembelajaran *learning by doing* dalam pembelajaran matakuliah kewirausahaan dipilih karena dapat menumbuhkan sikap kreatif dan inovatif mahasiswa serta merupakan modal utama untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Demikian yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Winaya Mukti, dimana dengan metode pembelajaran berbasis *learning by doing* untuk matakuliah kewirausahaan diharapkan dapat menjadi bekal calon alumni dalam membangun dan menjalankan suatu usaha yang berdaya saing tinggi (Harnani, 2020).



Dalam konteks Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah (UIN SATU) Tulungagung, rintisan untuk mengimplementasikan model *learning by doing* khususnya pada matakuliah kewirausahaan sudah terbuka lebar termasuk media yang digunakan. Media yang dimaksud yaitu SATUPay yang pada hari Jum'at, 14 Januari 2022 di-LAUNCHING oleh Rektor UIN SATU Tulungagung Prof. Dr. H. Maftukhin, M.Ag. Inilah titik awal UIN SATU Tulungagung melakukan transformasi dan menjadi pioner lahirnya Kampus Digital yang sekaligus sebagai embrio lahirnya Kewirausahaan Digital (*Digitpreneurship*) di perguruan tinggi.



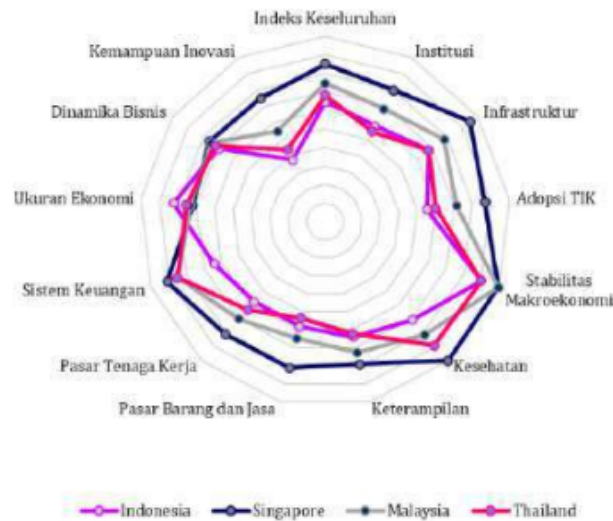
BAB 10

PENUTUP

Kewirausahaan berbasis *Learning by Doing* yang menurut banyak ahli dapat meningkatkan semangat dan budaya berwirausaha mahasiswa tidak bisa berjalan secara mandiri untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa. Buku ini memberikan bukti secara empiris bahwa kesejahteraan tidak datang begitu saja, melainkan membutuhkan sikap inovatif dan kreatif peserta didik yaitu mahasiswa melalui pembelajaran kewirausahaan dengan teknik *Learning by Doing*. Dengan teknik pembelajaran ini peneliti yakin bahwa secara bertahap kesejahteraan suatu bangsa dapat terwujud, dengan memperhatikan beberapa aspek. Aspek yang dimaksud yaitu: (1) daya saing; (2) kewirausahaan global; (3) jumlah UMKM; (4) tenaga kerja UMKM; (5) ekspor non migas UMKM dan (6) investasi UMKM.

Berdasar pengamatan menggunakan data *time series* selama 10 tahun terakhir yaitu 2010 hingga 2021 dapat disimpulkan bahwa:

1. Daya saing Indonesia mengalami trend yang meningkat dan memiliki kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Peningkatan ini tidak bisa dilepaskan dari sepuluh pilar indeks daya saing, misalnya pilar institusi. Pada aspek ini yang perlu diperhatikan yaitu: kejelasan orientasi yang dirumuskan oleh pemerintah, manajemen pengelolaan perusahaan, hak milik keterbukaan, sektor publik yang berkinerja bagus, *checks and balances*, modal sosial dan keamanan. Sebelas pilar lainnya dapat dijelaskan pada gambar berikut ini, dimana tingkat daya saing Indonesia masih lebih rendah dibanding beberapa negara di ASEAN terpilih lainnya yaitu: Singapura, Malaysia dan Thailand.



2. Pada aspek kewirausahaan global, prestasi Indonesia juga bagus karena menunjukkan trend positif dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Namun demikian, pengaruh kewirausahaan global Indonesia terhadap kesejahteraan menunjukkan pola yang negatif. Artinya, semakin tinggi kewirausahaan maka semakin rendah kesejahteraan masyarakat. Dan sebaliknya semakin rendah kewirausahaan global maka semakin meningkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat disebabkan oleh kecenderungan bahwa peningkatan kewirausahaan secara kuantitas belum mampu meningkatkan kesejahteraan. Jadi perlu diwaspadai oleh pemerintah bahwa pemberian bantuan kredit murah melalui jalur kredit usaha rakyat (KUR) memang akan meningkatkan jumlah wirausahawan baru, tetapi sangat lebih baik jika diikuti oleh peningkatan kualitas melalui pelatihan, pendidikan, penyuluhan dan penguatan kapasitas wirausahawan lainnya baik dalam hal manajemen pemasaran, produksi, sumber daya manusia dan pemasarannya.
3. Tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah UMKM di Indonesia masih menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan. Dalam sepuluh tahun terakhir jumlah UMKM meningkat sehingga sangat berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja baru sehingga angka pengangguran dapat diminimalisir. Namun demikian untuk mencapai keberlanjutan bahwa peningkatan UMKM dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan keseimbangan secara kuantitas maupun kualitas UMKM.



DAFTAR PUSTAKA

- Ácsc, Z. J., & Szerb, L. (2009). The Global Entrepreneurship Index (GEINDEX). *Foundations and Trends in Entrepreneurship*. <https://doi.org/10.1561/03000000027>
- Adams, O., Dal Poz, M. R., Shengelia, B., Kwankam, S. Y., Issakov, A., Stilwell, B., Zurn, P., & Goubarev, A. (2002). Human, Physical, and Intellectual Resource Generation: Proposals for Monitoring. In *WHO/EIP/OSD/DP 02.49* (Vol. 2). <https://www.who.int/healthinfo/paper49.pdf>
- Ali Shah, A., Mehmood, T., Aamir Hashmi, M., Maqsood Shah, S., & Muhammad Shaikh, F. (2011). Performance of SMEs in Export Growth and Its Impact on Economy of Pakistan. *International Journal of Business and Management*, 6(7), 287–297. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v6n7p287>
- Appiah, M., Amoasi, R., & Frowne, D. I. (2019). *Human Development and Its Effects on Economic Growth and Development*. 12(2), 101–109. <https://doi.org/https://doi.org/10.21632/irjbs>
- Arisman. (2018). Determinant of Human Development Index in ASEAN Countries. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 7(1), 113–122. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15408/sjie.v7i1.6756>

Buku Referensi : Learning By Doing Pembelajaran Kewirausahaan di Perguruan Tinggi

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

6%

★ www.scribd.com

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%